



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

LKjIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN **DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR** EVALUASI TAHUN 2022



Jl. Gayung Kebonsari No. 169 Surabaya 60235
Telp. (031) 8292419, 8292234, 8291711, 8295822
Email : pengairan@jatimprov.go.id

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SubhanahuWataala atas rahmat dan hidayahNya semata, Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi atas penggunaan anggaran dengan melaksanakan pengukuran kinerja dan evaluasi serta menganalisa terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur disusun sesuai amanat Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja.

Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur akan senantiasa berupaya dan bekerja lebih keras lagi, serta menyempurnakan kebijakan yang ada untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran strategis, sehingga diharapkan di masa yang akan datang capaian semua sasaran strategis dapat lebih optimal.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat dan dapat menjadi acuan untuk mengevaluasi kinerja Dinas selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja tahun depan secara lebih produktif, efektif dan efisien sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran, progam dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Surabaya, Januari 2023

**KEPALA DINAS PU SUMBER DAYA AIR
PROVINSI JAWA TIMUR**



Ir. BAJU TRIHAKSORO, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19650823 199403 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR GRAFIK

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN 1

 A. STRUKTUR ORGANISASI 1

 B. TUGAS DAN FUNGSI 4

 C. ISU STRATEGIS 6

 D. CASCADING KINERJA 6

 E. PETA PROSES BISNIS 11

 F. RINGKASAN LAPORAN HASIL EVALUASI 16

BAB II PERENCANAAN KINERJA 17

 2.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2019 – 2024 17

 2.1.1 TUJUAN 17

 2.1.2 SASARAN 19

 2.1.3 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 20

 2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 23

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 24

 3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 24

 3.1.1 PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA 24

 3.1.2 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA 28

 3.1.3 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TERHADAP RPJMD 29

 29

 3.1.4 ANALISA PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN DAN SOLUSI 30

 3.1.5 ANALISA PENGGUNAAN SUMBER DAYA ANGGARAN 34

 3.1.6 ANALISA PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN/KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA ... 36

 3.2 REALISASI ANGGARAN 45

 3.2.1 Program Pelayanan Kesekretariatan 45

 3.2.2 Program Pengendalian Daya Rusak Air 45

3.3	TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI	47
BAB IV	PENUTUP	48
4.1	KESIMPULAN	48
4.2	LANGKAH-LANGKAH DI MASA MENDATANG	49



DAFTAR LAMPIRAN

- A. FORM PENDANAAN INDIKATIF PADA RENSTRA
- B. CASCADING KINERJA (KETERKAITAN RPJMD DENGAN RENSTRA)
- C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
- D. REKAPITULASI DATA
- E. PETA PROSES BISNIS (BERDASAR RPJMD 2019 – 2024)



DAFTAR TABEL

Tabel	Uraian	Hal
Tabel 1.1	Matriks Perubahan Kelembagaan dan Wilayah Kerja UPT	2
Tabel 2.1	Matrik Hubungan Antara Misi dan Tujuan	17
Tabel 2.2	Matriks Hubungan antara Tujuan dan Sasaran	18
Tabel 2.3	Rencana kinerja Tahun 2022	22
Tabel 3.1	Tujuan 1 Sasaran 1 Tahun 2022	23
Tabel 3.2	Realisasi Tujuan 1 Sasaran 1 Tahun 2022	24
Tabel 3.3	Capaian Tujuan 1 Sasaran 1 Tahun 2022	24
Tabel 3.4	Tujuan 2 Sasaran 2 Tahun 2022	26
Tabel 3.5	Realisasi Tujuan 2 Sasaran 2 Tahun 2022	26
Tabel 3.6	Capaian Tujuan 2 Sasaran 2 Tahun 2022	26
Tabel 3.7	Kinerja Bangunan Jaringan Irigasi	27
Tabel 3.8	Tujuan 3 Sasaran 3 Tahun 2022	29
Tabel 3.9	Realisasi Tujuan 3 Sasaran 3 Tahun 2022	29
Tabel 3.10	Capaian Tujuan 3 Sasaran 3 Tahun 2022	29
Tabel 3.11	Tujuan 4 Sasaran 4 Tahun 2022	31
Tabel 3.12	Realisasi Tujuan 4 Sasaran 4 Tahun 2022	32
Tabel 3.13	Capaian Tujuan 4 Sasaran 4 Tahun 2022	32
Tabel 3.14	Tujuan 5 Sasaran 5 Tahun 2022	34
Tabel 3.15	Realisasi Tujuan 5 Sasaran 5 Tahun 2022	35
Tabel 3.16	Capaian Tujuan 5 Sasaran 5 Tahun 2022	35
Tabel 3.17	Alokasi Per Sasaran Pembangunan	37
Tabel 3.18	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	38

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR	URAIAN	HAL
Gambar 1.	Struktur Organisasi Dinas PU Sumber Daya Air berdasarkan Pergub 105 Tahun 2021	4
Gambar 2.	Keterkaitam RPJMD dengan RENSTRA	6



DAFTAR GRAFIK

GRAFIK	URAIAN	HAL
Grafik 1.	Target dan Realisasi Indeks Ketahanan Air Tahun 2020 – 2022	25
Grafik 2.	Target dan Realisasi Persentase Kondisi Prasarana Irigasi dalam Kondisi Baik Tahun 2020 – 2022	28
Grafik 3.	Target dan Realisasi Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian pada Sistem Irigasi Kewenangan Provinsi Tahun 2020 – 2022	30
Grafik 4.	Target dan Realisasi Persentase Penurunan Jumlah desa yang Terdampak Kerugian Akibat Banjir Tahun 2020 – 2022	33
Grafik 5.	Target dan Realisasi Nilai evaluasi implementasi SAKIP perangkat daerah Tahun 2019 – 2022	36





BAB I PENDAHULUAN



REDMI NOTE 8 PRO

AI QUAD CAMERA

BAB I

PENDAHULUAN

A. STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dibentuk pasca berlakunya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Setelah melalui proses *assesment* sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, diambil keputusan bahwa Dinas Pekerjaan Umum Pengairan (Nomenklatur sebelum berlakunya UU 23 Tahun 2014) berubah menjadi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dengan level Dinas Daerah Tipe A dimana Kepala Dinas (Es. IIa) membawahi Sekretaris (Es. IIIa) dan 4 (empat) Bidang setingkat Eselon IIIa.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka dilakukan perubahan susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur, kemudian dituangkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 105 Tahun 2021.

Mengingat rentang kendalanya yang cukup luas meliputi 38 Kabupaten/Kota seluas 47.779,975 km² wilayah daratan, berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur, Kinerja Dinas PU Sumber Daya Air ditunjang dengan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis yang berkedudukan di 6 (enam) kota di Jawa Timur yaitu Bojonegoro, Kediri, Pasuruan, Pamekasan, Bondowoso, dan Lumajang.

Sebelum berlakunya Pergub Nomor 49 Tahun 2018, UPT Dinas berjumlah 10 (sepuluh) unit terdiri dari 9 (sembilan) UPT Kewilayahan dan 1 (satu) UPT Peralatan. Sehubungan dengan rasionalisasi Jumlah UPT Provinsi sesuai dengan PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dilakukan penggabungan dan penghapusan UPT sebagaimana disajikan pada

Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Matriks Perubahan Kelembagaan dan Wilayah Kerja UPT

NO	PERGUB 107/2016	Wilayah Kerja	PERGUB 49/2018	Wilayah Kerja
1	UPT PSDA di Bojonegoro	Kab Tuban, Kab Bojonegoro, Kab Lamongan, Kab Gresik	UPT PSDA WS Bengawan Solo di Bojonegoro	Kab Tuban, Kab Bojonegoro, Kab Lamongan, Kab Gresik
2	UPT PSDA di Madiun	Kab Pacitan, Kab Ponorogo, Kab/Kota Madiun, Kab Ngawi, Kab Magetan		Kab Pacitan, Kab Ponorogo, Kab/Kota Madiun, Kab Ngawi, Kab Magetan
3	UPT PSDA di Kediri	Kab/Kota Kediri, Kab Trenggalek, Kab Nganjuk, Kab Jombang	UPT PSDA WS Brantas di Kediri	Kab/Kota Kediri, Kab Trenggalek, Kab Nganjuk, Kab Jombang
4	UPT PSDA di Malang	Kota Batu, Kab/Kota Malang, Kab/Kota Blitar, Kab Tulungagung	Dihapus (menjadi kordinator wilayah dengan tugas kewilayahan tetap)	Kota Batu, Kab/Kota Malang, Kab/Kota Blitar, Kab Tulungagung
5	UPT PSDA di Surabaya	Kota Surabaya, Kab/Kota Mojokerto, Kab Sidoarjo	Dihapus (menjadi kordinator wilayah dengan tugas kewilayahan tetap)	Kota Surabaya, Kab/Kota Mojokerto, Kab Sidoarjo
6	UPT PSDA di Pamekasan	Kab Bangkalan, Kab Sampang, Kab Pamekasan, Kab Sumenep	UPT PSDA WS Madura - Bawean	Kab Bangkalan, Kab Sampang, Kab Pamekasan, Kab Sumenep
7	UPT PSDA di Pasuruan	Kab/Kota Pasuruan, Kab/Kota Probolinggo	UPT PSDA WS Welang Pekalen	Kab/Kota Pasuruan, Kab/Kota Probolinggo, Kec Lawang
8	UPT PSDA di Lumajang	Kab Lumajang, Kab Jember	UPT PSDA WS Bondoyudo Baru	Kab Lumajang, Kab Jember, Kab Banyuwangi (Sebagian) Kab. Malang (Sebagian)
9	UPT PSDA di Bondowoso	Kab Situbondo, Kab Bondowoso, Kab Banyuwangi	UPT PSDA WS Sampean Setail	Kab Situbondo, Kab Bondowoso, Kab Banyuwangi
10	UPT Depo Peralatan	Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi Sungai Orde 1 sd 5 WS Provinsi Tanggap Darurat Seluruh Wilayah Provinsi	Dihapus (dilaksanakan oleh PPK Depo Peralatan yang dijabat oleh Es IV di Bidang Sungai Waduk Pantai)	Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi Sungai Orde 1 sd 5 WS Provinsi Tanggap Darurat Seluruh Wilayah Provinsi

Salah satu hal yang mendasari perubahan UPT ini adalah adanya pemahaman, dari *Assessor* pada saat itu, mengenai beban kerja UPT Dinas di Wilayah Sungai Kewenangan Pusat. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, di Provinsi Jawa Timur telah ditetapkan 7 (Tujuh) Wilayah Sungai yang terdiri dari 2 (dua) Wilayah Sungai Kewenangan Pusat dan 5 (lima) Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi. Sedangkan Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota tidak ada di Provinsi Jawa Timur.

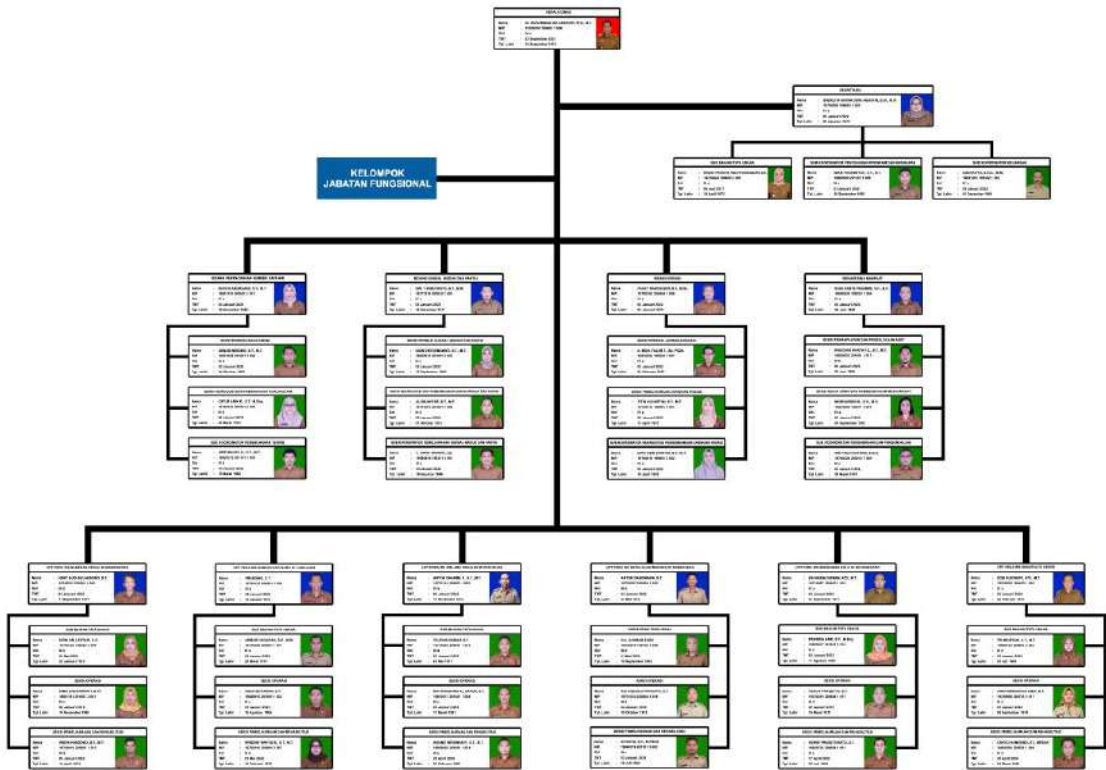
Wilayah Sungai dalam peraturan tersebut didefinisikan sebagai Kesatuan Wilayah Pengelolaan Sumber Daya Air dalam satu atau lebih Daerah Aliran Sungai dan/atau pulau – pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2000 km². Sedangkan Daerah Aliran Sungai adalah wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak – anak sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

Beban Kerja UPT yang berkedudukan di Wilayah Sungai Pusat, ditetapkan pada saat itu, merupakan kegiatan operasi dan pemeliharaan Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi dengan menganggap kegiatan lingkup Sumber Daya Air lain yang bersifat kewilayahan bukan menjadi tanggung jawab Provinsi karena merupakan Kewenangan Pusat. Hal tersebut berdampak pada penggabungan UPT Dinas yang berkedudukan di Wilayah Sungai Pusat hanya menjadi 1 (satu) UPT (**Tabel 1.1**).

Kegiatan Lingkup Sumber Daya Air yang bersifat kewilayahan dan dianggap bukan menjadi tanggung jawab Provinsi antara lain : Survey dan Inventarisasi dalam rangka mitigasi bencana (Tanggul Kritis Sungai), Pengelolaan data hidrologi pada pos hujan di luar Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi, Kegiatan Tanggap Darurat sementara penanganan tanggul putus, pembangunan tampungan air kecil dan usaha konservasi mata air.

Susunan Organisasi Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 105 Tahun 2021:

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PU SUMBER DAYA AIR PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2022



Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas PU Sumber Daya Air berdasarkan Pergub 105 Tahun 2021

B. TUGAS DAN FUNGSI

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi atas penggunaan anggaran dengan melaksanakan pengukuran kinerja dan evaluasi serta menganalisa terhadap pengukuran kinerja.

Tugas Utama Dinas PU Sumber Daya Air adalah membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang pekerjaan umum sumber daya air dan tugas pembantuan, yang diselenggarakan dengan melaksanakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum sumber daya air;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum sumber daya air;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum sumber daya air;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang pekerjaan umum sumber daya air;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Lingkup Kegiatan Sumber Daya Air adalah melaksanakan Perencanaan dan Perencanaan Teknis, Pembinaan, Pengusahaan, Eksploitasi dan Pemeliharaan, Perlindungan dan Pembiayaan.

C. ISU STRATEGIS

Isu – Isu Strategis Pengelolaan Sumber Daya Air di Jawa Timur untuk periode 2019 – 2024 Perubahan dirumuskan sebagai berikut :

- Menambah tampungan air baku di permukaan melalui revitalisasi tampungan yang sudah ada baik di sungai maupun waduk
- Meningkatkan resapan air di hulu DAS untuk mengurangi resiko bencana dan menambah simpanan air tanah
- Meningkatkan koordinasi antar lembaga pengelola Sumber Daya Air sebagai upaya memperkuat rencana pembangunan berbasis Daerah Aliran Sungai
- Mendukung Jawa Timur sebagai Lumbung Pangan Nasional dalam rangka Ketahanan Pangan
- Memantapkan ketahanan air dalam rangka mendukung sektor strategis, pencegahan bencana dan peningkatan kesejahteraan masyarakat

D. CASCADING KINERJA

Cascading Kinerja adalah proses penjabaran dan penyelarasan Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan/atau target IKU secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Cascading Kinerja juga merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target yang ingin dicapai dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.



[illegible]

2. CASCADING KINERJA BERDASARKAN SASARAN STRATEGIS 2

CASCADING SASARAN 2				
Ka PD	Bertambahnya Jumlah Bangunan Utama dan Panjang Saluran Pembawa / Pembuang yang Diperbaiki			
	Persentase Kondisi Fisik Prasarana Irigasi dalam Kondisi Baik			
Es. 3	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
	Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik			
Es. 4	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan		
	Jumlah dokumen teknis/lingkungan lingkup irigasi yang siap bangun	Jumlah Daerah Irigasi yang direhabilitasi UPT PSDA WS	Panjang Jaringan Irigasi Yang Dipelihara UPT PSDA WS	Jumlah bendung yang direhabilitasi UPT PSDA WS
Pelaksana	Analisis Pengembangan Infrastruktur, IK	Analisis Sumber Daya Air, IK	Analisis Sumber Daya Air, IK	Analisis Sumber Daya Air, IK
	Jumlah Laporan	Jumlah inventarisasi data pengawasan	Jumlah inventarisasi data pengawasan	Jumlah kegiatan inventarisasi data
	Jumlah laporan analisa data	Jumlah Laporan	Jumlah Laporan	Jumlah laporan analisa data
	Pengolah Pengelolaan Sumber Daya Air, IK	Analisis Pengelolaan Sumber Daya Air, IK	Analisis Pengelolaan Sumber Daya Air, IK	Pengawas Pengairan, IK
	Jumlah data Pelaporan Pola dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air	Jumlah laporan pekerjaan pengairan	Jumlah laporan pekerjaan pengairan	Jumlah laporan analisa data
	Jumlah data Bahan dan pelaporan Neraca Air Provinsi Jawa Timur	Jumlah kegiatan pelaksanaan pekerjaan pengairan	Jumlah kegiatan pelaksanaan pekerjaan pengairan	Jumlah laporan rekomendasi hasil analisa
	Pengelola Kegiatan Survey dan Perencanaan, IK	Pengelola Kegiatan Survey dan Perencanaan, IK	Pengelola Kegiatan Survey dan Perencanaan, IK	Pengolah Pengelolaan Sumber Daya Air, IK
	Jumlah dokumen inventarisasi kondisi dan fungsi jaringan irigasi, sungai, waduk dan embung	Jumlah dokumen inventarisasi kondisi dan fungsi jaringan irigasi, sungai, waduk dan embung	Jumlah dokumen inventarisasi kondisi dan fungsi jaringan irigasi, sungai, waduk dan embung	Jumlah kegiatan dokumentasi Aplikasi kegiatan Rehabilitasi
	Jumlah laporan survey	Jumlah laporan survey	Jumlah laporan survey	Jumlah laporan data kondisi Bendung, Saluran induk, Saluran
	Pengelola Pemeliharaan Jaringan Irigasi, IK	Pengelola Pemeliharaan Jaringan Irigasi, IK	Pengelola Pemeliharaan Jaringan Irigasi, IK	
	Jumlah data RAB pada kegiatan di UPT PSDA WS	Jumlah data RAB pada kegiatan di UPT PSDA WS	Jumlah data RAB pada kegiatan di UPT PSDA WS	
	Jumlah dokumen bahan penyusunan buku AKNOP UPT PSDA WS	Jumlah dokumen bahan penyusunan buku AKNOP UPT PSDA WS	Jumlah dokumen bahan penyusunan buku AKNOP UPT PSDA WS	
	Pengamat Operasi Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air, IK	Pengamat Operasi Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air, IK	Pengamat Operasi Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air, IK	
	Jumlah inventarisasi data operasi dan pemeliharaan	Jumlah inventarisasi data operasi dan pemeliharaan	Jumlah inventarisasi data operasi dan pemeliharaan	
	Jumlah data operasi dan pemeliharaan	Jumlah data operasi dan pemeliharaan	Jumlah data operasi dan pemeliharaan	
	Juru Operasi Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air, IK	Juru Operasi Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air, IK	Juru Operasi Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air, IK	
	Jumlah laporan berkala kepada UPT PSDA mengenai kondisi pintu air dan jaringan irigasi	Jumlah laporan berkala kepada UPT PSDA mengenai kondisi pintu air dan jaringan irigasi	Jumlah laporan berkala kepada UPT PSDA mengenai kondisi pintu air dan jaringan irigasi	
	Jumlah kegiatan kontrol kondisi jaringan irigasi dan bangunan pengairan	Jumlah kegiatan kontrol kondisi jaringan irigasi dan bangunan pengairan	Jumlah kegiatan kontrol kondisi jaringan irigasi dan bangunan pengairan	

3. CASCADING KINERJA BERDASARKAN SASARAN STRATEGIS 3

Ka PD	CASCADING SASARAN 3							
	Meningkatkan keberlanjutan dan ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat							
	Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian pada Sistem Irigasi Kewenangan Provinsi							
Es. 3	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota							
	Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian pada Sistem Irigasi Kewenangan Provinsi							
Es. 4	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan				Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi			
	Jumlah DI yang dilaksanakan kegiatan Pemeliharaan UPT PSDA WS	Jumlah Bendung dan Jaringan irigasi yang dioperasikan UPT PSDA WS	Jumlah bimtek untuk petugas irigasi yang dilaksanakan	Jumlah unit kerja yang dilaksanakan pembinaan OP irigasinya	Jumlah pintu air yang dipelihara UPT PSDA WS	Jumlah alat ukur yang dipelihara UPT PSDA WS	Jumlah DI yang dikelola muka air secara real time UPT PSDA WS	Jumlah Kabupaten yang dikelola rencana tata tanamnya UPT PSDA WS
Pelaksana	Pengamat Operasi Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air, IK Jumlah inventarisasi data operasi dan pemeliharaan	Analisis Sumber Daya Air, IK Jumlah inventarisasi data pengawasan pengairan	Analisis Sumber Daya Air, IK Jumlah kegiatan inventarisasi data	Analisis Sumber Daya Air, IK Jumlah kegiatan inventarisasi data	Pengamat Operasi Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air, IK Jumlah inventarisasi data operasi dan pemeliharaan	Pengamat Operasi Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air, IK Jumlah inventarisasi data operasi dan pemeliharaan	Pengamat Operasi Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air, IK Jumlah inventarisasi data operasi dan pemeliharaan	Pengawas Pengairan, IK Jumlah data inventarisasi pengawasan pengairan
	Jumlah kegiatan pemantauan jaringan irigasi	Jumlah kegiatan konsultasi permasalahan pekerjaan pengawasan	Jumlah laporan analisa data	Jumlah laporan analisa data	Jumlah data operasi dan pemeliharaan	Jumlah data operasi dan pemeliharaan	Jumlah data operasi dan pemeliharaan	Jumlah kegiatan konsultasi permasalahan pekerjaan pengawasan
	Juru Operasi Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air, IK Jumlah laporan berkala kepada UPT PSDA mengenai kondisi pintu air dan jaringan irigasi	Analisis Pengelolaan Sumber Daya Air, IK Jumlah inventarisasi data pengawasan pengairan	Pengawas Pengairan, IK Jumlah laporan analisa data	Pengawas Pengairan, IK Jumlah laporan analisa data	Juru Operasi Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air, IK Jumlah laporan berkala kepada UPT PSDA mengenai kondisi pintu air dan jaringan irigasi	Juru Operasi Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air, IK Jumlah laporan berkala kepada UPT PSDA mengenai kondisi pintu air dan jaringan irigasi	Juru Operasi Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air, IK Jumlah laporan berkala kepada UPT PSDA mengenai kondisi pintu air dan jaringan irigasi	Pengelola Kegiatan Survey dan Perencanaan, IK Jumlah laporan koordinasi dengan pihak terkait
	Jumlah kegiatan kontrol kondisi jaringan irigasi dan bangunan pengairan	Jumlah laporan pekerjaan pengairan	Jumlah laporan rekomendasi hasil analisa	Jumlah laporan rekomendasi hasil analisa	Jumlah laporan pengawasan dan pelaksanaan operasional dan pemeliharaan pintu air serta jaringan irigasi (tiap sepuluh hari)	Jumlah laporan pengawasan dan pelaksanaan operasional dan pemeliharaan pintu air serta jaringan irigasi (tiap sepuluh hari)	Jumlah laporan pengawasan dan pelaksanaan operasional dan pemeliharaan pintu air serta jaringan irigasi (tiap sepuluh hari)	Jumlah dokumen inventarisasi kondisi dan fungsi jaringan irigasi, sungai, waduk dan embung
		Pengelola Kegiatan Survey dan Perencanaan, IK Jumlah laporan koordinasi dengan pihak terkait						Pengelola Pemeliharaan Jaringan Irigasi, IK Jumlah data RAB pada kegiatan di UPT PSDA WS
		Jumlah dokumen inventarisasi kondisi dan fungsi jaringan irigasi, sungai, waduk dan embung						Jumlah data penyusun RAB serta didiskusikan dan diperbaiki dengan Pimpinan pada UPT PSDA WS.
		Pengelola Pemeliharaan Jaringan Irigasi, IK Jumlah data RAB pada kegiatan di UPT PSDA WS						
		Jumlah dokumen bahan penyusunan buku AKNOP UPT PSDA WS						
		Pengamat Operasi Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air, IK Jumlah inventarisasi data operasi dan pemeliharaan						
		Jumlah data operasi dan pemeliharaan						
		Juru Operasi Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air, IK Jumlah laporan berkala kepada UPT PSDA mengenai kondisi pintu air dan jaringan irigasi						
		Jumlah kegiatan kontrol kondisi jaringan irigasi dan bangunan pengairan						

4. CASCADING KINERJA BERDASARKAN SASARAN STRATEGIS 4

CASCADING SASARAN 4

Ka PD	Menurunya Kejadian Banjir di sungai-sungai yang rawan setelah pembangunan parapet dan normalisasi																			
	Persentase Penurunan Jumlah Desa yang terdampak Kerugian akibat kejadian banjir																			
ES. 3	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pngaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota																			
	Penurunan Jumlah Desa yang terdampak Kerugian akibat kejadian banjir																			
Es. 4	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pngaman Pantai	Pembangunan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)			Rehabilitasi Tanggul Sungai		Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing			Normalisasi/Restorasi Sungai		Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai		Operasi dan Pemeliharaan Sungai				Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing		
	Jumlah dokumen teknis/lingkungan hidup untuk konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pngaman Pantai	Peta Kejadian Banjir yang dibuat	Laporan Kejadian Banjir	SOP Penanggulangan Banjir	Jumlah sungai yang direhabilitasi	Panjang Tebing sungai yang direhabilitasi	Panjang tebing sungai/badan air yang diperbaiki UPT PSDA WS	Jumlah ruas sungai yang dinormalisasi UPT PSDA WS	Jumlah sungai yang disurvei kondisi tanggunya UPT PSDA WS	Jumlah badan air yang dinormalisasi	Volume sedimen yang dinormalisasi	Laporan Tanggul Kritis	Laporan Kondisi Kerusakan Sungai	Jumlah Badan air (Sungai dan Waduk) yang dimonitor datanya	Jumlah lokasi aset yang diamankan/ditertibkan	Aset Sumber Daya Air yang diamankan	Sosialisasi Pengendalian dan Pemakaian Tanah	Jumlah sungai yang direhabilitasi	Panjang tebing sungai yang direhabilitasi	
Pelaksana	Analisis Sumber Daya Air, IK	Analisis Sumber Daya Air, IK	Analisis Sumber Daya Air, IK	Analisis Sumber Daya Air, IK	Pengelola Teknis survey jaringan prasarana dan pelayanan, IK	Pengelola Teknis survey jaringan prasarana dan pelayanan, IK	Pengelola Teknis survey jaringan prasarana dan pelayanan, IK	Pengelola Teknis survey jaringan prasarana dan pelayanan, IK	Pengelola Teknis survey jaringan prasarana dan pelayanan, IK	Pengelola Teknis survey jaringan prasarana dan pelayanan, IK	Pengelola Teknis survey jaringan prasarana dan pelayanan, IK	Analisis Sumber Daya Air, IK	Analisis Sumber Daya Air, IK	Analisis Sumber Daya Air, IK	Pengelola Barang Milik Negara, IK	Pengelola Barang Milik Negara, IK	Pengelola Barang Milik Negara, IK	Analisis Sumber Daya Air, IK	Analisis Sumber Daya Air, IK	
	Jumlah kegiatan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya terkait rehabilitasi dan pengembangan sungai, waduk dan pantai	Jumlah kegiatan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya terkait rehabilitasi dan pengembangan sungai, waduk dan pantai	Jumlah kegiatan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya terkait rehabilitasi dan pengembangan sungai, waduk dan pantai	Jumlah kegiatan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya terkait rehabilitasi dan pengembangan sungai, waduk dan pantai	Jumlah kegiatan untuk pelaksanaan survey berdasarkan data dan informasi yang ada	Jumlah kegiatan untuk pelaksanaan survey berdasarkan data dan informasi yang ada	Jumlah kegiatan untuk pelaksanaan survey berdasarkan data dan informasi yang ada	Jumlah kegiatan untuk pelaksanaan survey berdasarkan data dan informasi yang ada	Jumlah kegiatan untuk pelaksanaan survey berdasarkan data dan informasi yang ada	Jumlah kegiatan untuk pelaksanaan survey berdasarkan data dan informasi yang ada	Jumlah kegiatan untuk pelaksanaan survey berdasarkan data dan informasi yang ada	Jumlah Laporan Bencana Banjir	Jumlah Laporan Bencana Banjir	Jumlah laporan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya terkait operasi sungai, waduk dan pantai untuk disampaikan kepada pimpinan unit	Jumlah laporan Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah;	Jumlah laporan Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah;	Jumlah laporan Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah;	Jumlah kegiatan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya terkait rehabilitasi dan pengembangan sungai, waduk dan pantai	Jumlah kegiatan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya terkait rehabilitasi dan pengembangan sungai, waduk dan pantai	
	Jumlah dokumen bahan-bahan kerja (kejadian banjir, dampak genangan, daerah rawan banjir)	Jumlah dokumen bahan-bahan kerja (kejadian banjir, dampak genangan, daerah rawan banjir)	Jumlah kegiatan menjaga Posko Siaga Banjir	Jumlah dokumen bahan-bahan kerja rehabilitasi dan pengembangan sungai, waduk dan pantai	Jumlah standar operasional survey guna menjamin standar hasil survey yang di inginkan	Jumlah standar operasional survey guna menjamin standar hasil survey yang di inginkan	Jumlah standar operasional survey guna menjamin standar hasil survey yang di inginkan	Jumlah standar operasional survey guna menjamin standar hasil survey yang di inginkan	Jumlah laporan hasil pelaksanaan survey	Jumlah laporan hasil pelaksanaan survey	Jumlah laporan hasil pelaksanaan survey	Jumlah kegiatan penelitian / studi literatur / kunjungan lapangan berdasarkan permasalahan pemeliharaan sungai, waduk dan pantai	Jumlah kegiatan penelitian / studi literatur / kunjungan lapangan berdasarkan permasalahan pemeliharaan sungai, waduk dan pantai	Jumlah kegiatan analisa terkait operasi sungai, waduk dan pantai serta ditunjang / dilengkapi peraturan perundangan yang berlaku	Jumlah berkas Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah;	Jumlah berkas Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah;	Jumlah berkas hasil pemeliharaan Barang Milik Daerah;	Jumlah dokumen bahan-bahan rehabilitasi dan pengembangan sungai, waduk dan pantai	Jumlah dokumen bahan-bahan rehabilitasi dan pengembangan sungai, waduk dan pantai	
	Teknik Pengairan, IK	Teknik Pengairan, IK	Teknik Pengairan, IK	Teknik Pengairan, IK	Teknisi Peralatan dan Mesin, IK	Teknisi Peralatan dan Mesin, IK	Teknisi Peralatan dan Mesin, IK	Teknisi Peralatan dan Mesin, IK	Teknisi Peralatan dan Mesin, IK	Teknisi Peralatan dan Mesin, IK	Teknisi Peralatan dan Mesin, IK	Pengawas Pengairan, IK	Pengawas Pengairan, IK	Pengawas Pengairan, IK	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah, IK	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah, IK	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah, IK	Teknik Pengairan, IK	Teknik Pengairan, IK	
	Jumlah naskah Pengembangan Pengelolaan Sungai : analisis permasalahan (AK.0.45)	Jumlah naskah Pengembangan Pengelolaan Sungai : analisis permasalahan (AK.0.45)	Jumlah naskah Pengembangan Pengelolaan Sungai : analisis permasalahan (AK.0.45)	Jumlah naskah Pengembangan Pengelolaan Sungai : analisis dan rekomendasi (AK.1.8)	Jumlah kegiatan uji coba / pengelasan : Mesin Penggerak & Pompa Air Tanah	Jumlah kegiatan uji coba / pengelasan : Mesin Penggerak & Pompa Air Tanah	Jumlah kegiatan uji coba / pengelasan : Mesin Penggerak & Pompa Air Tanah	Jumlah kegiatan uji coba / pengelasan : Mesin Penggerak & Pompa Air Tanah	Jumlah kegiatan uji coba / pengelasan : Mesin Penggerak & Pompa Air Tanah	Jumlah kegiatan uji coba / pengelasan : Mesin Penggerak & Pompa Air Tanah	Jumlah kegiatan uji coba / pengelasan : Mesin Penggerak & Pompa Air Tanah	Jumlah laporan rekomendasi hasil analisa	Jumlah laporan rekomendasi hasil analisa	Jumlah laporan rekomendasi hasil analisa	Jumlah data, inventarisasi pemakaian barang milik daerah (Barang bergerak);	Jumlah data, inventarisasi pemakaian barang milik daerah (Barang bergerak);	Jumlah data, inventarisasi pemakaian barang milik daerah (Barang bergerak);	Jumlah laporan Pengembangan Pengelolaan Sungai (AK.1.68)	Jumlah laporan Pengembangan Pengelolaan Sungai (AK.1.68)	

5. CASCADING KINERJA BERDASARKAN SASARAN STRATEGIS 5

[illegible]

E. PETA PROSES BISNIS

Business Proses Mapping atau Peta Proses Bisnis merupakan langkah awal bagi suatu organisasi atau lembaga dalam melakukan penataan tatalaksana di lingkungannya. Business Proses Mapping dilakukan dengan terlebih dahulu memetakan proses-proses yang ada di suatu organisasi atau lembaga. Pemetaan proses adalah visualisasi dari rangkaian seluruh aktivitas dari suatu organisasi, yang mendemonstrasikan bagaimana pekerjaan di dalam organisasi tersebut dilakukan, sehingga menjadikan pekerjaan tergambar dengan jelas/eksplisit.

Business Proses Mapping atau sering dikenal dengan pemetaan proses bisnis bertujuan untuk menata seluruh proses (tatalaksana) yang ada di sebuah organisasi atau lembaga sehingga memberikan dasar yang jelas bagi penyusunan SOP, agar organisasi atau lembaga bekerja dengan standar yang jelas, efektif, efisien, produktif, dan akuntabel.

Manfaat dari peta proses bisnis bagi organisasi atau lembaga yaitu dalam :

1. Pembuatan atau perbaikan Standar Operasional Prosedur (SOP), termasuk di dalamnya perbaikan standar kinerja pelayanan.
2. Perbaikan struktur organisasi.
3. Pembuatan atau perbaikan uraian pekerjaan (job descriptions).

Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur telah menetapkan Proses Bisnis supaya tercipta kejelasan dan sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi antar unit kerja dalam instansi guna pencapaian tujuan organisasi. Proses Bisnis Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur dapat digambarkan sebagaimana terlampir.

F. RINGKASAN LAPORAN HASIL EVALUASI TAHUN 2022

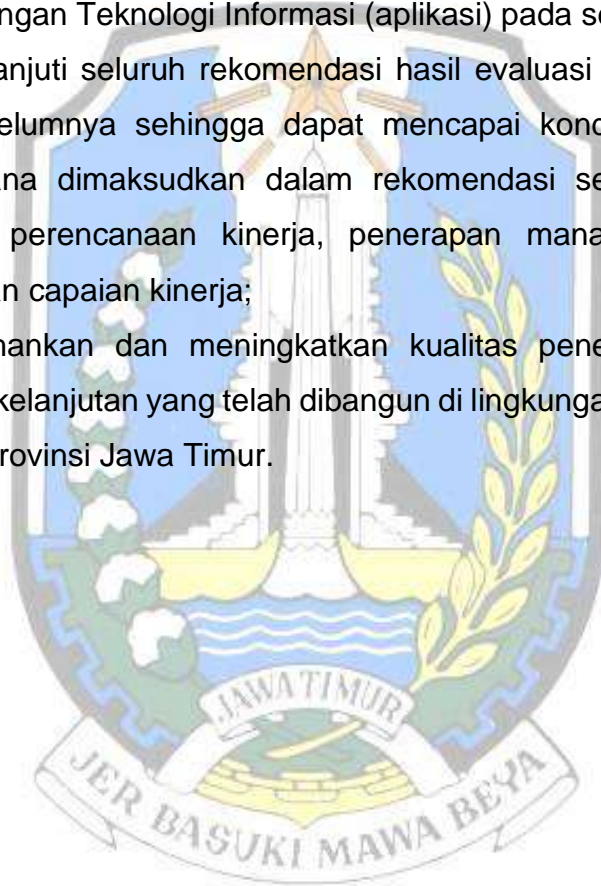
Berdasarkan surat Gubernur Jawa Timur Nomor 700/40018/031.2/2021 tanggal 19 September 2022 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur Tahun 2022, nilai akuntabilitas kinerja Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 adalah 85,13 termasuk kategori A dengan predikat “Memuaskan” dengan catatan hasil evaluasi sebagai berikut :

1. Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur Secara umum berhasil meningkatkan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam penyelenggaraan pemerintah sebagai pelaksanaan dari manajemen kinerja;
2. Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur telah menunjukkan upaya perbaikan manajemen kinerja secara berkelanjutan;
3. Penyusunan dokumen perencanaan belum memenuhi kriteria penyajian informasi kinerja yang baik yaitu adanya inkonsistensi antara indikator sasaran dan indikator program;
4. Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur belum memenuhi kriteria penyajian informasi kinerja yang baik, yaitu terdapat informasi yang belum selaras dengan dokumen perencanaan.

Dalam rangka meningkatkan manajemen kinerja, dapat direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas SDM dalam hal ini implementasi dan evaluasi manajemen kinerja baik secara kualitas maupun kuantitas pada lingkungan Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur;
2. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dengan Menyusun indikator sasaran dan indikator program yang memenuhi kriteria SMART serta melakukan penyelarasan dengan dokumen perencanaan lainnya;

3. Meningkatkan kualitas laporan kinerja Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur dengan menyajikan informasi kinerja yang baik yang selaras dengan dokumen perencanaan;
4. Pimpinan Perangkat Daerah agar memastikan pada setiap jenjang jabatan selalu dilakukan monitoring capaian kinerja sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment*;
5. Melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan memanfaatkan pengembangan Teknologi Informasi (aplikasi) pada seluruh unit kerja;
6. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun sebelumnya sehingga dapat mencapai kondisi yang diinginkan sebagaimana dimaksudkan dalam rekomendasi sebagai umpan balik perbaikan perencanaan kinerja, penerapan manajemen kinerja dan peningkatan capaian kinerja;
7. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas penerapan akuntabilitas kinerja berkelanjutan yang telah dibangun di lingkungan Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur.





BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGI TAHUN 2019-2024

Sebagaimana dimaksudkan dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Renstra PD disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

2.1.1 Tujuan

Sebagai penjabaran dan implementasi atas pernyataan misi, keberhasilan perumusan tujuan sangat dipengaruhi beberapa kriteria diantaranya akseptabilitas, fleksibilitas, dapat diukur, motivator, kesesuaian dengan rumusan visi dan misi organisasi dan mudah dipahami.

Tujuan yang telah ditetapkan adalah :

" Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi yang didukung Konektivitas Antar Wilayah “.

Sumber Daya Air perlu diatur untuk tujuan :

- a. memberikan perlindungan dan menjamin pemenuhan hak rakyat atas Air;
- b. menjamin keberlanjutan ketersediaan Air dan Sumber Air agar memberikan manfaat secara adil bagi masyarakat;
- c. menjamin pelestarian fungsi Air dan Sumber Air untuk menunjang keberlanjutan pembangunan;
- d. menjamin terciptanya kepastian hukum bagi terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap pemanfaatan Sumber Daya Air mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pemanfaatan;
- e. menjamin perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk Masyarakat Adat dalam upaya konservasi Air dan Sumber Air;
- f. Mengendalikan Daya Rusak Air secara menyeluruh yang mencakup upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan

Tabel : 2.1 Matriks Hubungan antara Misi dan Tujuan

MISI 1	TUJUAN 1	INDIKATOR	
Mewujudkan keseimbangan Pembangunan Ekonomi, baik antar kelompok, antar sektor dan keterhubungan wilayah	Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi yang didukung Konektivitas Antar Wilayah	1	Indeks Ketahanan Air
		2	Persentase kondisi prasarana irigasi dalam kondisi baik
		3	Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian pada Sistem Irigasi Kewenangan Provinsi
		4	Persentase penurunan jumlah desa yang terdampak kerugian akibat banjir
		5	Nilai evaluasi implementasi SAKIP perangkat daerah

2.1.2 Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2019-2024), dapat dirumuskan berdasarkan tujuan yang ada , yaitu :

Sasaran 9 : “ Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Sumber Daya Air “.

Tabel : 2.2 Matriks Hubungan antara Tujuan dan Sasaran

TUJUAN		SASARAN	
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR
Memantapkan kuantitas, kualitas, kontinuitas dan aksesibilitas sumber daya air untuk mendukung sektor-sektor strategis, pencegahan bencana dan peningkatan kesejahteraan rakyat	Indeks Ketahanan Air	1 Meningkatkan ketahanan air sektor ekonomi dan kebencanaan	Indeks Ketahanan Air
Meningkatkan optimalisasi pengelolaan irigasi	Persentase kondisi prasarana irigasi dalam kondisi baik	2 Bertambahnya Jumlah Bangunan Utama dan Panjang Saluran Pembawa / Pembuang yang diperbaiki	Persentase kondisi prasarana irigasi dalam kondisi baik
Penyediaan air baku untuk kebutuhan Masyarakat (Permen PU Nomor 01/PRT/M/2014)	Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian pada Sistem Irigasi Kewenangan Provinsi	3 Meningkatkan keberlanjutan dan ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat	Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian pada Sistem Irigasi Kewenangan Provinsi
Menurunkan Dampak atau Kerugian di Daerah Rawan Bencana Banjir	Persentase penurunan jumlah desa yang terdampak kerugian akibat banjir	4 Menurunnya kejadian banjir di sungai-sungai yang rawan setelah pembangunan parapet dan normalisasi	Persentase penurunan jumlah desa yang terdampak kerugian akibat banjir
Meningkatnya Kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Nilai evaluasi implementasi SAKIP perangkat daerah	5 Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai evaluasi implementasi SAKIP perangkat daerah

2.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah suatu usaha untuk merealisasikan tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Sedangkan pemilihan strategi adalah proses pembuatan keputusan untuk memilih alternatif terbaik dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran dengan cara yang paling baik. Strategi juga memperhatikan bagaimana organisasi meningkatkan kinerjanya, dan bagaimana mencapai misinya. Strategi yang telah ditetapkan adalah :

- a. Meningkatkan konservasi sumber daya air secara berkelanjutan dengan cara memelihara daerah tangkapan air dan menjaga kelangsungan fungsi resapan air;
- b. Mengendalikan daya rusak air dan pendayagunaan sumber daya air untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat dengan cara:
 - Menyediakan sarana dan prasarana pengendali banjir;
 - Memenuhi kebutuhan air untuk irigasi, domestik, industri dan kebutuhan air lainnya.

Arah Kebijakan yang telah ditetapkan adalah :

- a. Pengendalian Penerbitan Rekomendasi Teknik Sumber Daya Air
- b. Pengendalian dan Pengawasan Aset Sumber Daya Air
- c. Pembuatan Mini Lab Kualitas Air untuk assesmen cepat
- d. Relokasi pos hujan berbasis hasil rasionalisasi hidrologi

- e. Pemantauan pos hujan dan duga air yang mendukung flood early warning system dan pengumpulan data
- f. Peningkatan kualitas data dan peningkatan kemampuan analisa alokasi air
- g. Publikasi dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan aksesibilitas data SDA
- h. Kaji ulang DED sungai dan Irigasi
- i. Penguatan kordinasi antar lembaga pengelola
- j. Pembuatan Konstruksi Penahan Air di Hulu (Diatas Orde 3) dan Penanaman Pohon
- k. Rehabilitasi Bangunan Utama, Pengurangan kebocoran di Saluran Primer dan Sekunder, Perbaikan Pintu air dan Pembuang
- l. Pengerukan Rutin Saluran Primer dan Sekunder
- m. Pemenuhan kebutuhan tenaga Juru Pengairan Provinsi di DI Provinsi
- n. Pengelolaan Irigasi partisipatif melibatkan P3A
- o. Pembentukan dan penguatan Komisi Irigasi di Kabupaten
- p. Percepatan pengesahan Perda Irigasi
- q. Pemenuhan anggaran Angka Kebutuhan Nyata Operasi Irigasi (AKNOP) minimal 50% dengan trend penambahan 5% per tahun
- r. Perkuatan Institusi OP Irigasi
- s. Penyediaan data OP yang sahih (valid) dan akurat
- t. Inisiasi Modernisasi Irigasi
- u. Revitalisasi waduk, sungai, embung, ranu kewenangan provinsi
- v. Penertiban sempadan, Sertifikasi asset dan Pemasangan Patok Batas
- w. Penentuan 30 Sungai prioritas di WS Kewenangan Provinsi, Perbaikan tanggul dan pembuatan parapet, dan Parapet Bio Engineering

- x. Pemberdayaan Komunitas Masyarakat Peduli Sungai dan Kordinasi antar Lembaga
- y. Perkuatan database sungai dan sistem pelaporan banjir
- z. Respon Tanggap Darurat maksimum 18 jam setelah Laporan Masuk
- aa. Pembentukan Satuan Pemantau Banjir
- bb. Pengadaan Stock Bahan Banjiran Rp 1 M/UPT/Tahun
- cc. Peremajaan alat berat dan pengadaan alat/bahan tanggap darurat banjir
- dd. Pengoperasian Ruang Kendali Sungai
- ee. Publikasi Data Sungai rawan banjir
- ff. Optimalisasi pemanfaatan aplikasi Perencanaan, Pemantauan dan pengendalian program/Kegiatan
- gg. Optimalisasi pemanfaatan aplikasi laporan keuangan dan Verifikasi dokumen pertanggungjawaban
- hh. Peningkatan kapasitas pegawai dan Penyusunan program pembinaan pegawai baik teknis maupun administratif

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Untuk Penyusunan Perjanjian Kinerja Eselon II, Eselon III, Eselon IV dan Jabatan Fungsional Umum (JFU) sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.

Adapun Rencana Kinerja Tahun 2022 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

Tabel : 2.3	Rencana Kinerja Tahun 2022
--------------------	-----------------------------------

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
Memantapkan kuantitas, kualitas, kontinuitas dan aksesibilitas sumber daya air untuk mendukung sektor-sektor strategis, pencegahan bencana dan peningkatan kesejahteraan rakyat	Meningkatnya ketahanan air sektor ekonomi dan kebencanaan	Indeks Ketahanan Air	2,94
Meningkatkan optimalisasi pengelolaan irigasi	Bertambahnya Jumlah Bangunan Utama dan Panjang Saluran Pembawa/Pembuang yang diperbaiki	Persentase kondisi prasarana irigasi dalam kondisi baik	68,90 %
Penyediaan air baku untuk kebutuhan Masyarakat (Permen PU Nomor 01/PRT/M/2014)	Meningkatkan keberlanjutan dan ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat	Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian pada Sistem Irigasi Kewenangan Provinsi	83,00 %
Menurunkan Dampak atau Kerugian di Daerah Rawan Bencana Banjir	Menurunnya kejadian banjir di sungai-sungai yang rawan setelah pembangunan parapet dan normalisasi	Persentase penurunan jumlah desa yang terdampak kerugian akibat banjir	5,51 %
Meningkatnya Kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai evaluasi implementasi SAKIP perangkat daerah	84,26

Penetapan Kinerja Tahun 2022 dijadikan acuan untuk mengukur Kinerja Tahun 2022 dan melaporkannya dalam Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur Tahun 2022.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja merupakan pengukuran tingkat capaian kinerja yang diperoleh berdasarkan perbandingan antara target dengan realisasi yang berhasil dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun berjalan. Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur didapatkan dengan membandingkan antara Realisasi yang dicapai dengan target sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur tahun 2022 dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur dengan Gubernur Provinsi Jawa Timur.

3.1.1 PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA

Berikut ini merupakan gambaran umum pencapaian kinerja organisasi pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur:

SASARAN STRATEGIS 1 :

Meningkatnya ketahanan air sektor ekonomi dan kebencanaan

Sasaran Prioritas Pembangunan ini diukur melalui 1 (satu) indikator yaitu Indeks Ketahanan Air.

Tabel 3.1 Tujuan 1 Sasaran 1 Tahun 2022

TUJUAN	SASARAN 1	INDIKATOR SASARAN 1
Memantapkan kuantitas, kualitas, kontinuitas dan aksesibilitas sumber daya air untuk mendukung sektor-sektor strategis, pencegahan bencana dan peningkatan kesejahteraan rakyat	Meningkatnya ketahanan air sektor ekonomi dan kebencanaan	Indeks Ketahanan Air

Tabel 3.2 Realisasi Tujuan 1 Sasaran 1 Tahun 2022

SASARAN 1	INDIKATOR SASARAN 1	REALISASI
Meningkatnya ketahanan air sektor ekonomi dan kebencanaan	Indeks Ketahanan Air	3,00

Tabel 3.3 Capaian Tujuan 1 Sasaran 1 Tahun 2022

REALISASI			TAHUN 2022			PENINGKATAN TAHUN 2022	RENSTRA TAHUN 2019 - 2024		
2019	2020	2021	TARGET	REALISASI	CAPAIAN		TARGET TAHUN 2024	REALISASI s/d 2022	TINGKAT KEMAJUAN
-	2,95	2,95	2,94	3,00	102,04%	2,03%	2,98	3,00	100,67%

Indeks Ketahanan Air merupakan kemampuan suatu wilayah untuk memenuhi kebutuhan air dari segi kuantitas, kualitas, kontinuitas dan aksesibilitasnya (yang untuk saat ini analisa sektoralnya masih terbatas) pada sektor Rumah Tangga (Domestik), Ekonomi, Perkotaan, Lingkungan dan Bencana. Untuk masing – masing sektor telah ditentukan pula sub indikator dalam menghitung tingkat pemenuhan kebutuhan untuk selanjutnya dikonversi menjadi indeks. Konversi Indeks pada tiap sektor mengacu pada Tabel Kriteria Indeks yang dikeluarkan oleh Asian Development Bank tahun 2016.

Formulasi Indeks Ketahanan Air secara Sederhana dijelaskan sebagai berikut :

INDEKS KETAHANAN AIR =		fungsi rerata	<div> Indeks Ketahanan Air Rumah Tangga Indeks Ketahanan Air Perkotaan Indeks Ketahanan Air Ekonomi Indeks Ketahanan Air Lingkungan Indeks Ketahanan Bencana Daya Rusak Air </div>
Indeks	Klasifikasi		
1	Sangat Buruk		
2	Buruk		
3	Sedang		
4	Baik		
5	Sangat Baik		
Sumber: Pusair (2017)			

Rekapitulasi Perhitungan Indeks Ketahanan Air Jawa Timur Tahun 2022

Dimensi	Skor	Indeks	Kategori
Konservasi SDA	17,60		
Pendayagunaan SDA	15,56		
Pengendalian Daya Rusak	10,15		
Peran Serta Masyarakat	9,38		
SISDA	7,67		
Skor Ketahanan Air Jawa Timur 2022	60,35	3	Capable/Moderat

Capaian kinerja Indeks Ketahanan Air sebesar 3 meningkat dari tahun lalu dari target 2,92. Skor Ketahanan Air Jawa Timur Tahun 2022 adalah 60,35 kriteria penilaian untuk Indeks Ketahanan Air (IKA) Jawa Timur adalah 3 atau masuk dalam kategori Capable/Moderat. Kategori Moderat mengindikasikan bahwa Ketahan Air Jawa Timur Tahun 2022 berada di posisi rata-rata,hal ini dapat dilihat dari skor pada masing-masing dimensi yang menunjukkan nilai sedikit di atas rata-rata dari masing-masing nilai bobotnya. Ketahanan air bersifat dinamis Tentunya perlu Dilakukan upaya Yang konsisten Untuk memperbaiki dan meningkatkannya dengan cara mengoptimalkan nilai atau skor pada masing-masing dimensi atau indikator.



Grafik 1. Target dan Realisasi Indeks Ketahanan Air Tahun 2020 - 2022

Terdapat kendala dalam pencapaian Realisasi Kinerja Indeks Ketahanan Air pada tahun 2022 dimana data-data penunjang perhitungan didapat dari beberapa OPD terkait. Maka diperlukan komitmen dari OPD terkait penyampaian data dimaksud. Upaya yang dilakukan dengan rapat koordinasi secara berkala dengan OPD terkait.

SASARAN STRATEGIS 2 :
Bertambahnya Jumlah Bangunan Utama dan Panjang Saluran Pembawa/Pembuang yang diperbaiki

Sasaran Prioritas Pembangunan ini diukur melalui 1 (satu) indikator yaitu Persentase kondisi prasarana irigasi dalam kondisi baik.

Tabel 3.4 Tujuan 2 Sasaran 2 Tahun 2022

TUJUAN	SASARAN 2	INDIKATOR SASARAN 2
Meningkatkan optimalisasi pengelolaan irigasi	Bertambahnya Jumlah Bangunan Utama dan Panjang Saluran Pembawa/Pembuang yang diperbaiki	Persentase kondisi prasarana irigasi dalam kondisi baik

Tabel 3.5 Realisasi Tujuan 2 Sasaran 2 Tahun 2022

SASARAN 2	INDIKATOR SASARAN 2	REALISASI
Bertambahnya Jumlah Bangunan Utama dan Panjang Saluran Pembawa/Pembuang yang diperbaiki	Persentase kondisi prasarana irigasi dalam kondisi baik	68,90 %

Tabel 3.6 Capaian Tujuan 2 Sasaran 2 Tahun 2022

REALISASI			TAHUN 2022			PENINGKATAN TAHUN 2022	RENSTRA TAHUN 2019 - 2024		
2019	2020	2021	TARGET	REALISASI	CAPAIAN		TARGET TAHUN 2024	REALISASI s/d 2022	TINGKAT KEMAJUAN
-	68,79	68,86	68,90	68,90	100,00%	0,06%	69,00	68,90	99,86%

Persentase Kondisi Fisik Prasarana Irigasi dalam Kondisi Baik merupakan bertambahnya jumlah bangunan utama dan panjang saluran pembawa/pembuang yang diperbaiki tiap tahunnya dibagi dengan total panjang saluran yang dikelola. Formula sederhana ini dapat digantikan dengan Indeks Prasarana pada Indeks Kinerja Saluran Irigasi (IKSI) apabila penggunaan IKSI sudah dilakukan di semua DI.

Tabel 3.7 Kinerja Bangunan Jaringan Irigasi

No.	Uraian	2018		2019		2020		2021		2022	
		capaian	%	capaian	%	capaian	%	capaian	%	capaian	%
1	Kondisi saluran baik (km)	1.147,99	65,70	1.152,50	62,43	1.139,01	61,70	1.143.832	60,27	1.338.067	66,89
2	Kondisi saluran rusak (ringan/berat) (km)	599,30	34,30	693,50	37,57	706,99	38,30	706.991	37,25	341.590	33,11
	Total panjang saluran (km)	1.747,29	100	1.846,00	100	1.846,00	100	1.897.900	100	1.679.657	100
1	Kondisi bangunan baik (unit)	3.898	71,69	4.258	75,87	4.258	75,87	4.347	77,46	6.287	70,911
2	Kondisi bangunan rusak (ringan/berat) (km)	1.539	28,31	1.354	24,13	1.354	24,13	1.265	22,54	2.579	29,089
	Total Bangunan (Unit)	5.437	100	5.612	100	5.612	100	5.612	100	8.866	100
	Prosentase kondisi jaringan irigasi										
	Kondisi baik (rerata saluran + bangunan)		68,70		69,15		68,79		68,86		68,901
	Kondisi rusak (rerata saluran + bangunan)		31,30		30,85		31,21		29,90		31,099

Panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik = 1.338,067 Km
 Total panjang jaringan irigasi = 1.679,657 Km
 Jumlah bangunan dalam kondisi baik = 6.287,00 Buah
 Total jumlah bangunan = 8.866,00 Buah

Persentase Kinerja Jaringan Irigasi :

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik}}{\text{Total panjang jaringan irigasi}} \times 100 \% \\
 &= \left(\left(\frac{\text{Panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik}}{\text{Total panjang jaringan irigasi}} \times 100 \% \right) + \left(\frac{\text{Jumlah bangunan dalam kondisi baik}}{\text{Total jumlah bangunan}} \times 100 \% \right) \right) / 2 \\
 &= \frac{\left(\left(\frac{1.338,067}{1.679,657} \times 100 \% \right) + \left(\frac{6.287}{8.866} \times 100 \% \right) \right)}{2} \\
 &= 68,90\%
 \end{aligned}$$



Grafik 2. Target dan Realisasi Persentase Kondisi Prasarana Irigasi dalam Kondisi Baik Tahun 2020 - 2022

Capaian kinerja Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik sebesar 68,90 % sama dengan target 68,90 %. Capaian jaringan irigasi dalam kondisi baik dikarenakan penanganan jaringan irigasi melalui rehabilitasi fisik 103 Daerah Irigasi maupun peningkatan fungsi saluran dengan kegiatan operasi dan normalisasi pada 11 Daerah Irigasi dengan sumber pendanaan dari APBD, DAK dan IPDMIP.

Terdapat kendala dalam pencapaian Realisasi Kinerja Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik yaitu Laju kerusakan lebih cepat dibandingkan dengan tingkat perbaikan/pemeliharaan.

Dalam rangka meminimalisir kendala-kendala tersebut dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang dilakukan prioritas terhadap kegiatan fisik (pemeliharaan/rehabilitasi) untuk mengoptimalkan faktor kehilangan air.

SASARAN STRATEGIS 3 :

Meningkatkan keberlanjutan dan ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat

Sasaran Prioritas Pembangunan ini diukur melalui 1 (satu) indikator yaitu Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian pada Sistem Irigasi Kewenangan Provinsi.

Tabel 3.8 Tujuan 3 Sasaran 3 Tahun 2022

TUJUAN	SASARAN 3	INDIKATOR SASARAN 3
Penyediaan air baku untuk kebutuhan Masyarakat	Meningkatkan keberlanjutan dan ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat	Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian pada Sistem Irigasi Kewenangan Provinsi

Tabel 3.9 Realisasi Tujuan 3 Sasaran 3 Tahun 2022

SASARAN 3	INDIKATOR SASARAN 3	REALISASI
Meningkatkan keberlanjutan dan ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat	Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian pada Sistem Irigasi Kewenangan Provinsi	85,76 %

Tabel 3.10 Capaian Tujuan 3 Sasaran 3 Tahun 2022

REALISASI			TAHUN 2022			PENINGKATAN TAHUN 2022	RENSTRA TAHUN 2019 - 2024		
2019	2020	2021	TARGET	REALISASI	CAPAIAN		TARGET TAHUN 2024	REALISASI s/d 2022	TINGKAT KEMAJUAN
-	84,97	85,19	83,00	85,76	103,33%	0,67%	83,20	85,76	103,08%

Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian pada Sistem Irigasi Kewenangan Provinsi merupakan jaminan ketersediaan air irigasi untuk pertanian pada Sistem Irigasi Kewenangan Provinsi. Angka ketersediaan dihitung dari perbandingan data lapangan pemberian air irigasi di intake bendung dengan Rencana Alokasi Air untuk pertanian yang telah disepakati. Dalam praktiknya, Ketersediaan air tidak pernah mencapai angka 100% karena terdapat proses untuk memberikan kesempatan *top soil* meregenerasi dirinya sendiri melalui bero (tidak menanam) dan musim tanam polowijo.

Persentase pelayanan air untuk irigasi

Kebutuhan air = 548.127,65 m3/det

Ketersediaan air = 470.070,03 m3/det

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Ketersediaan air}}{\text{Kebutuhan air}} \times 100\% \\
 &= \frac{470.070,03}{548.127,65} \times 100\% \\
 &= 85,76 \, \%
 \end{aligned}$$



Grafik 3. Target dan Realisasi Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian pada Sistem Irigasi Kewenangan Provinsi Tahun 2020 - 2022

Capaian kinerja Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian pada Sistem Irigasi Kewenangan Provinsi sebesar 85,76 % lebih tinggi dari target 83,00%. Peningkatan Capaian Kinerja Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian pada Sistem Irigasi Kewenangan Provinsi dikarenakan Kepatuhan

pemakai air/ petani terhadap pola tanam/ rttg, Tata laksana pengaturan dan pembagian air irigasi bisa dilaksanakan dengan efektif dan efisien, Berjalannya koordinasi kelembagaan pengelola irigasi baik di tingkat pemerintah maupun HIPPA/GHIPPA, serta Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur terus berupaya melakukan inovasi-inovasi sehingga petugas OP dilapangan dapat memberikan laporan akurat/up to date kepada petugas di kantor (aplikasi pelaporan).

Terdapat kendala dalam pencapaian Realisasi Kinerja Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian pada Sistem Irigasi Kewenangan Provinsi yaitu Kurangnya Sumber Daya Manusia (Petugas PPA dan pekarya) karena banyak yang purna tugas dan belum ada pengganti sehingga akibat dari hal ini maka adanya penambahan wilayah kerja untuk PPA dan pekarya, dan Kurangnya komitmen penyedia jasa dalam menyelesaikan pekerjaan.

Dalam rangka meminimalisir kendala-kendala tersebut dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang dilakukan Pengusulan pengangkatan tenaga PPA dan pekarya, Pelaksanakan kegiatan lelang konstruksi di awal tahun, dan Meningkatkan kualitas kegiatan operasi dan irigasi untuk mempertahankan kinerja jaringan dan layanan air.

SASARAN STRATEGIS 4 :
Menurunnya kejadian banjir di sungai-sungai yang rawan setelah pembangunan parapet dan normalisasi

Sasaran Prioritas Pembangunan ini diukur melalui 1 (satu) indikator yaitu Persentase penurunan jumlah desa yang terdampak kerugian akibat banjir.

Tabel 3.11 Tujuan 4 Sasaran 4 Tahun 2022

TUJUAN	SASARAN 4	INDIKATOR SASARAN 4
Menurunkan Dampak atau Kerugian di Daerah Rawan Bencana Banjir	Menurunnya kejadian banjir di sungai-sungai yang rawan setelah pembangunan parapet dan normalisasi	Persentase penurunan jumlah desa yang terdampak kerugian akibat banjir

Tabel 3.12 Realisasi Tujuan 4 Sasaran 4 Tahun 2022

SASARAN 4	INDIKATOR SASARAN 4	REALISASI
Menurunnya kejadian banjir di sungai-sungai yang rawan setelah pembangunan parapet dan normalisasi	Persentase penurunan jumlah desa yang terdampak kerugian akibat banjir	7,65 %

Tabel 3.13 Capaian Tujuan 4 Sasaran 4 Tahun 2022

REALISASI			TAHUN 2022			PENINGKATAN TAHUN 2022	RENSTRA TAHUN 2019 - 2024		
2019	2020	2021	TARGET	REALISASI	CAPAIAN		TARGET TAHUN 2024	REALISASI s/d 2022	TINGKAT KEMAJUAN
-	4,91	5,70	5,51	7,65	138,84%	34,21%	5,39	7,65	138,84%

Persentase penurunan jumlah desa yang terdampak kerugian akibat banjir merupakan indikator keberhasilan penanganan banjir yang dilakukan. Mengingat perhitungan luas genangan masih sulit diukur secara akurat, maka digunakan parameter Desa rawan banjir. Merupakan indikator keberhasilan penanganan banjir yang dilakukan. Mengingat perhitungan luas genangan masih sulit diukur secara akurat, maka digunakan parameter Desa rawan banjir.

Jumlah Desa Rawan Banjir = 731 Desa

Jumlah Desa yang dilakukan penanganan fisik = 650 Desa

Jumlah Desa se Jawa Timur = 8.496 Desa

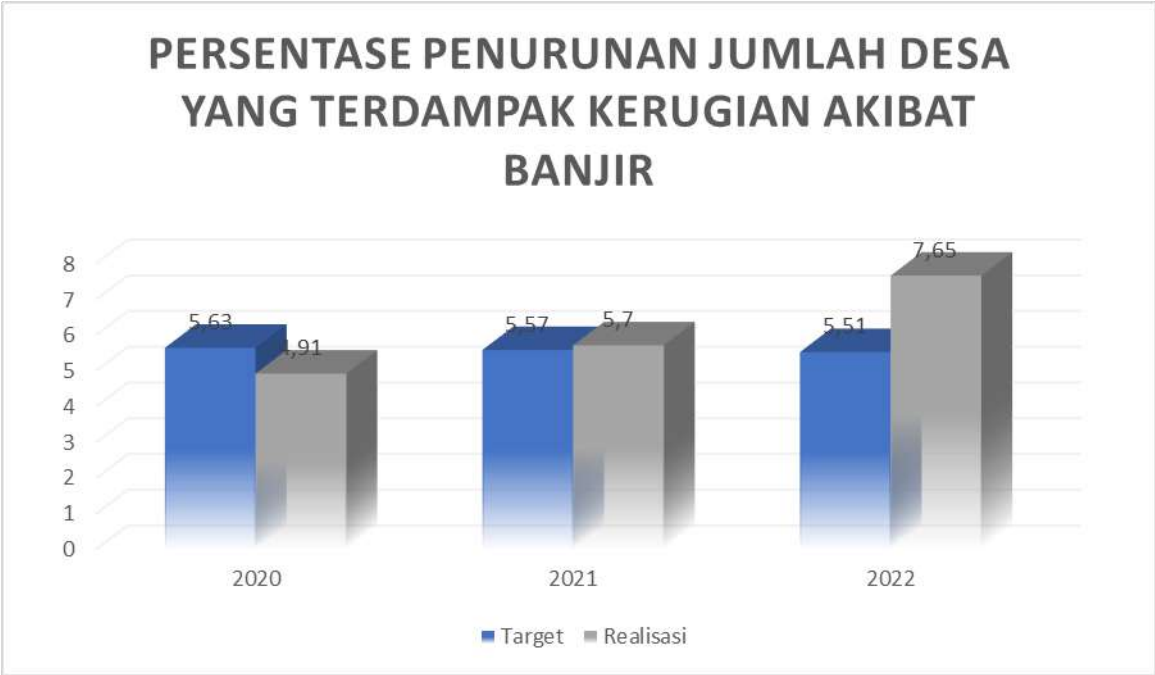
Persentase Penurunan Jumlah Desa yang terdampak kerugian akibat Banjir :

$$= \frac{Jumlah\ desa\ yang\ dilakukan\ penangan\ fisik}{Jumlah\ desa\ rawan\ banjir} \times 100\%$$

$$= \frac{650}{8496} \times 100\%$$

$$= 7,65\%$$

* target pertahun 5,51% sudah melampaui target pertahun



Grafik 4. Target dan Realisasi Persentase Penurunan Jumlah desa yang Terdampak Kerugian Akibat Banjir Tahun 2020 - 2022

Capaian kinerja Persentase penurunan jumlah desa yang terdampak kerugian akibat banjir sebesar 7,65 % lebih tinggi dari target 5,51%. Peningkatan Capaian Kinerja Persentase penurunan jumlah desa yang terdampak kerugian akibat banjir dikarenakan Adanya peningkatan pekerjaan fisik normalisasi dan kegiatan pemeliharaan serta pembangunan fisik di titik kritis banjir di wilayah sungai Provinsi Jawa Timur.

Terdapat kendala dalam pencapaian Realisasi Kinerja Persentase penurunan jumlah desa yang terdampak kerugian akibat banjir yaitu:

1. Belum adanya Petugas OP Sungai dalam memonitor sungai;
2. Dikarenakan wilayah jawa timur yang luas adanya keterbatasan dalam memonitoring titik kritis banjir sehingga diperlukan adanya peningkatan pembangunan cctv dan telemetri di seluruh wilayah upt psda ws jawa timur;
3. Keterbatasan armada, biaya dan personil dalam melaksanakan kegiatan normalisasi ataupun pembersihan sungai;
4. Perubahan tata guna lahan di hulu-tengah DAS meluas dan tidak terkendali, hal ini mengakibatkan terbatasnya/menyusutnya daerah resapan air (recharge area), berkurangnya embung/ situ/ tampungan air/ cekungan air sehingga menjadi kendala besar pengendalian banjir di hilir Perilaku masyarakat kota masih banyak yang tidak ramah lingkungan, utamanya dalam hal sampah, dan pertanian tanpa upaya konservasi tanah

- dan air di wilayah tengah dan hulu DAS pada lahan pertanian dengan kemiringan besar (meningkatkan erosi-sedimentasi dan tanah longsor);
- 5. Lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran perlindungan LH, utamanya alih fungsi lahan di wilayah resapan air (tengah dan hulu DAS);
- 6. Kurangnya sinergitas dalam pemanfaatan dana pelaku usaha/csr untuk pengendalian banjir.

Dalam rangka meminimalisir kendala-kendala tersebut dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang dilakukan :

- 1. Adanya peningkatan pekerjaan fisik normalisasi dan kegiatan pemeliharaan serta pembangunan fisik di titik kritis banjir di wilayah sungai provinsi jawa timur;
- 2. Adanya peningkatan monitoring pelaporan banjir secara realtime di Control Room Dinas dengan aplikasi SIBB dan Whatapp grup banjir;
- 3. Adanya peningkatan monitoring realtime secara visual dengan CCTV di lokasi titik pantau banjir wilayah sungai provinsi jatim;
- 4. Adanya sistem piket banjir 24 jam terkait pelaporan banjir , koordinasi dan respon dalam menangani banjir bertambahnya titik daerah rawan banjir.

SASARAN STRATEGIS 5 :
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Sasaran Prioritas Pembangunan ini diukur melalui 1 (satu) indikator yaitu Nilai evaluasi implementasi SAKIP perangkat daerah.

Tabel 3.14 Tujuan 5 Sasaran 5 Tahun 2022

TUJUAN	SASARAN 5	INDIKATOR SASARAN 5
Meningkatnya Kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai evaluasi implementasi SAKIP perangkat daerah

Tabel 3.15 Realisasi Tujuan 5 Sasaran 5 Tahun 2022

SASARAN 5	INDIKATOR SASARAN 5	REALISASI
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai evaluasi implementasi SAKIP perangkat daerah	85,13 %

Tabel 3.16 Capaian Tujuan 5 Sasaran 5 Tahun 2022

REALISASI			TAHUN 2022			PENINGKATAN TAHUN 2022	RENSTRA TAHUN 2019 - 2024		
2019	2020	2021	TARGET	REALISASI	CAPAIAN		TARGET TAHUN 2024	REALISASI s/d 2022	TINGKAT KEMAJUAN
84,27	85,26	84,47	84,26	85,13	101,03%	0,78%	84,46	85,13	100,79%

No.	Komponen	Bobot	Nilai 2022
A	Perencanaan Kinerja	30%	23,04
B	Pengukuran Kinerja	30%	29,58
C	Laporan Kinerja	15%	11,57
D	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	20,94
	Nilai Hasil Evaluasi	100%	85,13
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			A (Memuaskan)

Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur Tahun 2022, nilai akuntabilitas kinerja Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 adalah 85,13 termasuk kategori A dengan predikat “Memuaskan” dengan catatan hasil evaluasi sebagai berikut :

- Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur Secara umum berhasil meningkatkan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam penyelenggaraan pemerintah sebagai pelaksanaan dari manajemen kinerja;
- Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur telah menunjukkan upaya perbaikan manajemen kinerja secara berkelanjutan;

3. Penyusunan dokumen perencanaan belum memenuhi kriteria penyajian informasi kinerja yang baik yaitu adanya inkonsistensi antara indikator sasaran dan indikator program;
4. Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur belum memenuhi kriteria penyajian informasi kinerja yang baik, yaitu terdapat informasi yang belum selaras dengan dokumen perencanaan.



Grafik 5. Target dan Realisasi Nilai evaluasi implementasi SAKIP perangkat daerah
Tahun 2019 - 2022

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, didukung oleh 1 (satu) program yaitu "Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi" dengan anggaran sebesar Rp. 139.295.651.586,00 realisasi Rp. 134.358.225.497,00 atau 96,46% .

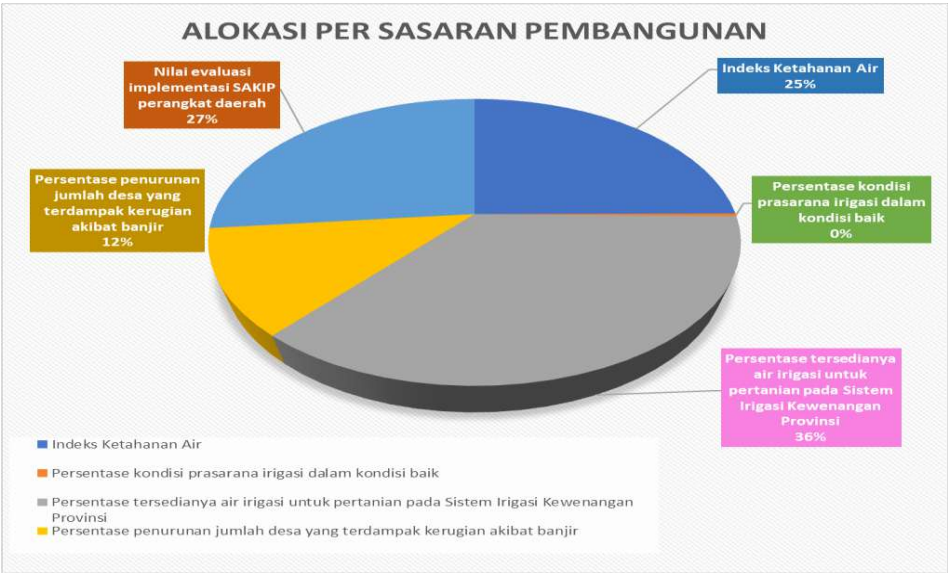
Upaya yang dilakukan untuk mencapai Sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah” dengan indikator ” Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah” dilaksanakan kegiatan-kegiatan Pembinaan Pegawai.

ANALISIS PENGGUNAAN SUMBER DAYA ANGGARAN

Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik, tentunya harus didukung anggaran yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya.

Tabel 3.17
Alokasi Per Sasaran Pembangunan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN	% ANGGARAN
1	Meningkatnya ketahanan air sektor ekonomi dan kebencanaan	Indeks Ketahanan Air	130.592.715.025	24,92
2	Bertambahnya Jumlah Bangunan Utama dan Panjang Saluran Pembawa/Pembuang yang diperbaiki	Persentase kondisi prasarana irigasi dalam kondisi baik	1.700.000.000	0,32
3	Meningkatkan keberlanjutan dan ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat	Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian pada Sistem Irigasi Kewenangan Provinsi	189.801.862.441	36,22
4	Menurunnya kejadian banjir di sungai-sungai yang rawan setelah pembangunan parapet dan normalisasi	Persentase penurunan jumlah desa yang terdampak kerugian akibat banjir	62.568.337.037	11,94
5	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai evaluasi implementasi SAKIP perangkat daerah	139.295.651.586	26,59



Grafik 6. Alokasi Per Sasaran Pembangunan

Tabel 3.18 EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
Meningkatnya ketahanan air sektor ekonomi dan kebencanaan	Indeks Ketahanan Air	102,04	98,49	3,55 %
Bertambahnya Jumlah Bangunan Utama dan Panjang Saluran Pembawa/Pembuang yang diperbaiki	Persentase kondisi prasarana irigasi dalam kondisi baik	100,00	85,37	14,63 %
Meningkatkan keberlanjutan dan ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat	Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian pada Sistem Irigasi Kewenangan Provinsi	103,33	87,34	15,96 %
Menurunnya kejadian banjir di sungai-sungai yang rawan setelah pembangunan parapet dan normalisasi	Persentase penurunan jumlah desa yang terdampak kerugian akibat banjir	138,84	95,19	43,65 %
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai evaluasi implementasi SAKIP perangkat daerah	101,03	96,46	4,57 %

ANALISA PROGRAM / KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN / KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Program tersebut didukung oleh Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan yang menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja :

- Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya, dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah dokumen teknis/lingkungan lingkup Tampungan air yang diselesaikan dengan target 1 dan realisasi 1.
- Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai, dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah dokumen teknis/lingkungan lingkup pengendalian banjir yang diselesaikan dengan target 11 dan realisasi 11.
- Sub kegiatan Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah kegiatan dalam rangka mendukung Pola dan Perencanaan SDA yang dilaksanakan dengan target 1 dan realisasi 1.
- Sub kegiatan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah sungai yang direhabilitas dengan target 1 dan realisasi 1
 - Panjang tebing sungai yang direhabilitasi dengan target 2500 dan realisasi 2540
- Sub kegiatan Pembangunan Flood Forecasting And Warning System (FFWS) dengan indikator kinerja yaitu :
 - Peta Kejadian Banjir yang dibuat dengan target 6 dan realisasi 6
 - Laporan Kejadian Banjir dengan target 38 dan realisasi 38

- SOP Penanggulangan Banjir dengan target 1 dan realisasi 1
- Sub kegiatan Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah sungai yang disurvei kondisi tanggulnya UPT PSDA WS Sampean Setail dengan target 11 dan realisasi 11.
 - Jumlah ruas sungai yang dinormalisasi UPT PSDA WS Bondoyudo Baru dengan target 3 dan realisasi 3.
 - Panjang tebing sungai/badan air yang diperbaiki UPT PSDA WS Welang Pekalen dengan target 150 dan realisasi 150.
 - Panjang tebing sungai/badan air yang diperbaiki UPT PSDA WS Kepulauan Madura dengan target 70 dan realisasi 70.
 - Jumlah ruas sungai yang dinormalisasi UPT PSDA WS Kepulauan Madura dengan target 2 dan realisasi 2.
 - Jumlah sungai yang disurvei kondisi tanggulnya UPT PSDA WS Bondoyudo Baru dengan target 2 dan realisasi 2.
 - Jumlah sungai yang disurvei kondisi tanggulnya UPT PSDA WS Welang Pekalen dengan target 2 dan realisasi 2.
 - Jumlah sungai yang disurvei kondisi tanggulnya UPT PSDA WS Kepulauan Madura dengan target 2 dan realisasi 2.
- Sub kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah badan air yang dinormalisasi dengan target 4 dan realisasi 15
 - Volume sedimen yang dinormalisasi dengan target 60.000 dan realisasi 98.947
- Sub kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai dengan indikator kinerja yaitu :
 - Laporan Tanggul Kritis dengan target 1 dan realisasi 1
 - Laporan Kondisi Kerusakan Sungai target 1 dan realisasi 1.
- Sub kegiatan Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah pos hujan yang dikelola datanya di UPT PSDA WS Sampean Setail dengan target 113 dan realisasi 113.

- Jumlah pos hujan yang dikelola datanya di UPT PSDA WS Bondoyudo Baru dengan target 145 dan realisasi 145.
 - Jumlah pos klimatologi yang dikelola datanya di UPT PSDA WS Bondoyudo Baru dengan target 2 dan realisasi 2.
 - Jumlah pos hujan yang dikelola datanya di UPT PSDA WS Welang Pekalen dengan target 94 dan realisasi 94.
 - Jumlah pos hujan yang dikelola datanya di UPT PSDA WS Kepulauan Madura dengan target 68 dan realisasi 68.
 - Jumlah pos klimatologi yang dikelola datanya di UPT PSDA WS Kepulauan Madura dengan target 3 dan realisasi 3.
 - Jumlah pos klimatologi yang dikelola datanya di UPT PSDA WS Welang Pekalen dengan target 1 dan realisasi 1.
 - Jumlah kegiatan kualitas air yang dikelola datanya di UPT PSDA WS Sampean Setail dengan target 10 dan realisasi 10.
 - Jumlah kegiatan kualitas air yang dikelola datanya di UPT PSDA WS Bondoyudo Baru dengan target 19 dan realisasi 19.
 - Jumlah kegiatan kualitas air yang dikelola datanya di UPT PSDA WS Welang Pekalen dengan target 10 dan realisasi 10.
 - Jumlah kegiatan kualitas air yang dikelola datanya di UPT PSDA WS Kepulauan Madura dengan target 6 dan realisasi 6.
 - Jumlah pos hujan yang dikelola datanya di Bidang PSDA dengan target 6 dan realisasi 6.
 - Jumlah data pos klimatologi yang dikelola datanya di Bidang PSDA dengan target 4 dan realisasi 4.
 - Jumlah data kualitas air yang dikelola datanya di Bidang PSDA dengan target 4 dan realisasi 4.
- Sub kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Kelompok Masyarakat yang berpartisipasi dalam pengelolaan Sumber Daya Air di Bidang Sungai, Waduk dan Pantai dengan target 256 dan realisasi 255.
 - Jumlah Kelompok Masyarakat yang berpartisipasi dalam pengelolaan Sumber Daya Air di Bidang Irigasi dengan target 324 dan realisasi 321

- Jumlah Kelompok Masyarakat yang berpartisipasi dalam pengelolaan Sumber Daya Air di Bidang Bina Manfaat dengan target 373 dan realisasi 370.
 - Jumlah Kelompok Masyarakat yang berpartisipasi dalam pengelolaan Sumber Daya Air di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air dengan target 291 dan realisasi 290.
- Sub kegiatan Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah rekomendasi teknik yang diterbitkan di Bidang Bina Manfaat dengan target 180 dan realisasi 328.
 - Sosialisasi Pemanfaatan Sumber Daya Air di Bidang Bina Manfaat dengan target 2 dan realisasi 2.
 - Rekomendasi Aset Sumber Daya Air yang diusahakan di Bidang Bina Manfaat dengan target 1 dan realisasi 1.
 - Rekomendasi WIUP di Bidang Bina Manfaat dengan target 1 dan realisasi 1.
 - Dokumen Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah penggunaan Dinas Sumber Daya Air di Bidang Bina Manfaat dengan target 4 dan realisasi 4.
 - Dokumen Percepatan Sertifikasi Tanah di Bidang Bina Manfaat dengan target 4 dan realisasi 4.
 - Dokumen Inventarisasi Aset di Bidang Bina Manfaat dengan target 4 dan realisasi 4.
- Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi dengan indikator kinerja yaitu :
- Pelatihan O dan P Jaringan Irigasi Partisipatif HIPPA/G. HIPPA/I. HIPPA/F. HIPPA yang dilaksanakan di Bidang Bina Manfaat dengan target 4 dan realisasi 4.
 - Jumlah dokumen naskah kerjasama yang ditanda tangani di Bidang Bina Manfaat dengan target 1 dan realisasi 1.
 - Jumlah Komunitas Sungai yang dibina di Bidang Sungai Waduk Pantai dengan target 1 dan realisasi 1.

- Jumlah Rekomendasi TKPSDA yang diusulkan untuk ditindak lanjuti di Bidang Sungai Waduk Pantai dengan target 2 dan realisasi 2.
 - Jumlah Rekomendasi TKPSDA yang diusulkan untuk ditindak lanjuti di UPT PSDA WS Brantas dengan target 1 dan realisasi 1.
 - Jumlah Rekomendasi TKPSDA yang diusulkan untuk ditindak lanjuti di UPT PSDA WS Bengawan Solo dengan target 1 dan realisasi 1.
 - Jumlah Rekomendasi TKPSDA yang diusulkan untuk ditindak lanjuti di UPT PSDA WS Sampean Setail dengan target 1 dan realisasi 1.
 - Jumlah Rekomendasi TKPSDA yang diusulkan untuk ditindak lanjuti di UPT PSDA WS Bondoyudo Baru dengan target 2 dan realisasi 2.
 - Jumlah Rekomendasi TKPSDA yang diusulkan untuk ditindak lanjuti di UPT PSDA WS Welang Pekalen dengan target 2 dan realisasi 2.
 - Jumlah Rekomendasi TKPSDA yang diusulkan untuk ditindak lanjuti di UPT PSDA WS Kep. Madura dengan target 1 dan realisasi 1.
 - Lomba Penilaian Kinerja HIPPA dan G. HIPPA Tingkat Provinsi Jawa Timur yang dilaksanakan Bidang Bina Manfaat dengan target 1 dan realisasi 1.
 - Pendataan dan Inventarisasi Data HIPPA dan GHIPPA di Bidang Bina Manfaat dengan target 1 dan realisasi 1.
- Sub kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sungai dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Badan air (Sungai dan Waduk) yang dimonitor datanya di Bidang Sungai Waduk Pantai dengan target 3 dan realisasi 3.
 - Jumlah lokasi aset yang diamankan/ditertibkan dengan target 4 dan realisasi 4.
 - Jumlah Badan air/Sungai/Waduk/DAS yang dimonitor datanya di UPT PSDA WS Brantas dengan target 1 dan realisasi 1.
 - Jumlah Badan air/Sungai/Waduk/DAS yang dimonitor datanya di UPT PSDA WS Bengawan Solo dengan target 2 dan realisasi 2.

- Jumlah Badan air/Sungai/Waduk/DAS yang dimonitor datanya di UPT PSDA WS Sampean Setail dengan target 5 dan realisasi 5.
 - Jumlah Badan air/Sungai/Waduk/DAS yang dimonitor datanya di UPT PSDA WS Bondoyudo Baru dengan target 2 dan realisasi 2.
 - Jumlah Badan air/Sungai/Waduk/DAS yang dimonitor datanya di UPT PSDA WS Welang Pekalen dengan target 1 dan realisasi 1.
 - Jumlah Badan air/Sungai/Waduk/DAS yang dimonitor datanya di UPT PSDA WS Kep Madura dengan target 1 dan realisasi 1.
 - Sosialisasi Pengendalian dan Pemakaian Tanah di Bidang Bina Manfaat dengan target 2 dan realisasi 2.
 - Aset Sumber Daya Air yang diamankan di Bidang Bina Manfaat dengan target 3 dan realisasi 3.
- Sub kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah DAS yang dilaksanakan Kegiatan Konservasi di UPT PSDA WS Brantas dengan target 1 dan realisasi 1.
 - Jumlah DAS yang dilaksanakan Kegiatan Konservasi di UPT PSDA WS Bengawan Solo dengan target 2 dan realisasi 2.
 - Jumlah DAS yang dilaksanakan Kegiatan Konservasi di UPT PSDA WS Sampean Setail dengan target 1 dan realisasi 1.
 - Jumlah DAS yang dilaksanakan Kegiatan Konservasi di UPT PSDA WS Bondoyudo Baru dengan target 2 dan realisasi 2.
 - Jumlah DAS yang dilaksanakan Kegiatan Konservasi di UPT PSDA WS Welang Pekalen dengan target 1 dan realisasi 1.
 - Jumlah DAS yang dilaksanakan Kegiatan Konservasi di UPT PSDA WS Kep Madura dengan target 3 dan realisasi 3.
 - Jumlah mata air yang dipelihara dengan target 6 dan realisasi 6.
 - Jumlah lokasi kegiatan pengawetan air dengan target 6 dan realisasi 6.
 - Jumlah titik biopori/ bibit pohon untuk kegiatan konservasi dengan target 6 dan realisasi 32.

Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan yang menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja :

- Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa dengan indikator kinerja yaitu:
 - Jumlah dokumen teknis/lingkungan lingkup irigasi yang siap bangun dengan target 2 dan realisasi 2.
- Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan dengan indikator kinerja yaitu:
 - Jumlah Daerah Irigasi yang direhabilitasi UPT PSDA WS Brantas dengan target 10 dan realisasi 10.
 - Panjang Jaringan Irigasi Yang Dipelihara UPT PSDA WS Brantas dengan target 1000 dan realisasi 1000.
 - Jumlah bendung yang direhabilitasi UPT PSDA WS Brantas dengan target 1 dan realisasi 1.
 - Panjang Jaringan Irigasi Yang Dipelihara UPT PSDA WS Bengawan Solo dengan target 1000 dan realisasi 1000.
 - Jumlah bendung yang direhabilitasi UPT PSDA WS Bengawan Solo dengan target 2 dan realisasi 2.
 - Jumlah Daerah Irigasi yang direhabilitasi UPT PSDA WS Welang Pekalen dengan target 4 dan realisasi 4.
 - Panjang Jaringan Irigasi Yang Dipelihara UPT PSDA WS Welang Pekalen dengan target 770 dan realisasi 770.
 - Jumlah bendung yang direhabilitasi UPT PSDA WS Welang Pekalen dengan target 4 dan realisasi 4.
 - Jumlah Daerah Irigasi yang direhabilitasi UPT PSDA WS Sampean Setail dengan target 3 dan realisasi 3.
 - Panjang Jaringan Irigasi Yang Dipelihara UPT PSDA WS Sampean Setail dengan target 728 dan realisasi 728.
 - Jumlah bendung yang direhabilitasi UPT PSDA WS Sampean Setail dengan target 2 dan realisasi 2.
 - Jumlah Daerah Irigasi yang direhabilitasi UPT PSDA WS Bondoyudo Baru dengan target 6 dan realisasi 6.
 - Panjang Jaringan Irigasi Yang Dipelihara UPT PSDA WS Bondoyudo Baru dengan target 2000 dan realisasi 2000.

- Jumlah bendung yang direhabilitasi UPT PSDA WS Bondoyudo Baru dengan target 1 dan realisasi 1.
 - Jumlah Daerah Irigasi yang direhabilitasi UPT PSDA WS Kep Madura dengan target 1 dan realisasi 1.
 - Panjang Jaringan Irigasi Yang Dipelihara UPT PSDA WS Kep Madura dengan target 3830 dan realisasi 3830.
 - Jumlah bendung yang direhabilitasi UPT PSDA WS Kep Madura dengan target 1 dan realisasi 1.
- Sub kegiatan Rehabilitasi Bendung Irigasi dengan indikator kinerja yaitu: Jumlah DI yang dikelola kegiatan rehabilitasinya dengan target 23 dan realisasi 23.
- Sub kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan dengan indikator kinerja yaitu:
- Jumlah DI yang dilaksanakan kegiatan Pemeliharaan UPT PSDA WS Kep Madura dengan target 4 dan realisasi 4.
 - Jumlah Bendung dan Jaringan irigasi yang di operasikan UPT PSDA WS Kep Madura dengan target 5 dan realisasi 5.
 - Jumlah Bendung dan Jaringan irigasi yang di operasikan UPT PSDA WS Brantas dengan target 55 dan realisasi 55.
 - Jumlah Bendung dan Jaringan irigasi yang di operasikan UPT PSDA WS Sampean Setail dengan target 13 dan realisasi 13.
 - Jumlah DI yang dilaksanakan kegiatan Pemeliharaan UPT PSDA WS Bondoyudo Baru dengan target 1 dan realisasi 1.
 - Jumlah Bendung dan Jaringan irigasi yang di operasikan UPT PSDA WS Bondoyudo Baru dengan target 8 dan realisasi 8.
 - Jumlah Bendung dan Jaringan irigasi yang di operasikan UPT PSDA WS Welang Pekalen dengan target 1 dan realisasi 1.
 - Jumlah DI yang dilaksanakan kegiatan Pemeliharaan UPT PSDA WS Welang Pekalen dengan target 1 dan realisasi 1.
- Sub kegiatan Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi dengan indikator kinerja yaitu:
- Jumlah pintu air yang dipelihara UPT PSDA WS Kepulauan Madura dengan target 1 dan realisasi 1.
 - Jumlah DI yang dikelola muka air secara real time UPT PSDA WS Kepulauan Madura dengan target 5 dan realisasi 5.

- Jumlah Kabupaten yang dikelola rencana tata tanamnya UPT PSDA WS Kepulauan Madura dengan target 4 dan realisasi 4.
- Jumlah pintu air yang dipelihara UPT PSDA WS Brantas dengan target 55 dan realisasi 55.
- Jumlah pintu air yang dipelihara UPT PSDA WS Bondoyudo Baru dengan target 26 dan realisasi 26.
- Jumlah pintu air yang dipelihara UPT PSDA WS Sampean Setail dengan target 44 dan realisasi 44.
- Jumlah pintu air yang dipelihara UPT PSDA WS Welang Pekalen dengan target 10 dan realisasi 10.
- Jumlah pintu air yang dipelihara UPT PSDA WS Bengawan Solo dengan target 58 dan realisasi 58.
- Jumlah alat ukur yang dipelihara UPT PSDA WS Bengawan Solo dengan target 1 dan realisasi 1.
- Jumlah alat ukur yang dipelihara UPT PSDA WS Bondoyudo Baru dengan target 9 dan realisasi 9.
- Jumlah DI yang dikelola muka air secara real time UPT PSDA WS Bondoyudo Baru dengan target 13 dan realisasi 13.
- Jumlah DI yang dikelola muka air secara real time UPT PSDA WS Brantas dengan target 55 dan realisasi 55.
- Jumlah DI yang dikelola muka air secara real time UPT PSDA WS Sampean Setail dengan target 13 dan realisasi 13.
- Jumlah DI yang dikelola muka air secara real time UPT PSDA WS Bengawan Solo dengan target 58 dan realisasi 58.
- Jumlah DI yang dikelola muka air secara real time UPT PSDA WS Welang Pekalen dengan target 25 dan realisasi 25.
- Jumlah Kabupaten yang dikelola rencana tata tanamnya UPT PSDA WS Welang Pekalen dengan target 2 dan realisasi 2.
- Jumlah Kabupaten yang dikelola rencana tata tanamnya UPT PSDA WS Bengawan Solo dengan target 10 dan realisasi 10.
- Jumlah Kabupaten yang dikelola rencana tata tanamnya UPT PSDA WS Sampean Setail dengan target 3 dan realisasi 3.
- Jumlah Kabupaten yang dikelola rencana tata tanamnya UPT PSDA WS Brantas dengan target 9 dan realisasi 9.
- Jumlah Kabupaten yang dikelola rencana tata tanamnya UPT PSDA WS Bondoyudo Baru dengan target 2 dan realisasi 2.

3.2. REALISASI ANGGARAN

Pengukuran pencapaian kinerja anggaran adalah berdasarkan persentase rata-rata realisasi anggaran pada masing-masing program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam DPPA APBD tahun 2022. Adapun jumlah APBD Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur tahun 2022 adalah sebesar Rp523.958.566.089,- dan terealisasi sebesar Rp489.763.160.516,- atau mencapai 93,47 % dengan rincian sebagai berikut :

3.2.1 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

NO.	URAIAN	ANGGARAN SETELAH P-APBD 2022	REALISASI 2022	
			Rp.	%
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	384.662.914.503	355.404.935.019	92,39
	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	193.161.052.062	188.177.907.001	97,42
	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	191.501.862.441	167.227.028.018	87,32
2	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	139.295.651.586	134.358.225.497	96,46
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	192.137.863	186.592.665	97,11
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100.252.613.729	96.537.252.140	96,29
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	14.159.753.580	13.643.870.623	96,36
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	512.514.918	503.429.642	98,23
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.217.397.268	11.716.295.390	95,90
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.961.234.228	11.770.785.037	98,41

Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dengan pagu APBD Murni Rp. 328.752.997.032 sebesar Rp. pagu PAPBD sebesar Rp. 384.662.914.503, terealisasi sebesar 92,39 % atau Rp. 355.404.935.019

- Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu APBD Murni sebesar Rp. 163.168.672.938 pagu PAPBD sebesar Rp. 193.161.052.062, terealisasi sebesar 97,42 % atau Rp. 188.177.907.001
- Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu APBD Murni sebesar Rp. 165.584.324.094 pagu PAPBD sebesar Rp. 191.501.862.441, terealisasi sebesar 87,32 % atau Rp. 167.227.028.018

3.2.2 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan pagu APBD Murni sebesar Rp. 144.855.101.237 pagu PAPBD sebesar Rp. 139.295.651.586, terealisasi sebesar 96,46 % atau Rp. 134.358.225.497

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan pagu APBD Murni sebesar Rp. 242.275.863, pagu PAPBD sebesar Rp. 192.137.863, terealisasi sebesar 97,11 % atau Rp. 186.592.665
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan pagu APBD Murni sebesar Rp. 117.087.920.729, pagu PAPBD sebesar Rp. 100.252.613.729, terealisasi sebesar 96,29 % atau Rp. 96.537.252.140
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan pagu APBD Murni sebesar Rp. 13.439.242.874, pagu PAPBD sebesar Rp. 14.159.753.580, terealisasi sebesar 96,36 % atau Rp. 13.643.870.623

- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan pagu APBD Murni sebesar Rp. 576.889.418, pagu PAPBD sebesar Rp. 512.514.918, terealisasi sebesar 98,23 % atau Rp. 503.429.642
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan pagu APBD Murni sebesar Rp. 7.055.235.455, pagu PAPBD sebesar Rp. 12.217.397.268, terealisasi sebesar 95,90 % atau Rp. 11.716.295.390
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan pagu APBD Murni sebesar Rp. 6.453.536.898, pagu PAPBD sebesar Rp. 11.961.234.228, terealisasi sebesar 98,41 % atau Rp. 11.770.785.037

3.2.3 Program Pengelolaan Sumber Daya Air

Pada tahun 2022, Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur telah mendapatkan dana yang bersumber dari APBN untuk Tugas Pembantuan Operasi dan Pemeliharaan (TP-OP) Daerah Irigasi Kewenangan Pusat yang berada di Wilayah Jawa Timur dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 91.452.285.000,00 dengan realisasi Rp 91.382.729.019,00 atau 99,92 % dan Progres fisik 100%.

3.3. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja serta menumbuhkembangkan budaya kinerja, selama tahun 2022 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur telah melakukan beberapa upaya perbaikan implementasi SAKIP sesuai dengan rekomendasi Tim Evaluator SAKIP Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai berikut :

- Peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas secara intensif dan berkelanjutan telah dilakukan utamanya melalui kegiatan pembinaan, pendampingan dan evaluasi akuntabilitas kinerja. Menyediakan fasilitasi konsultasi kepada setiap unit kerja baik secara individu maupun pertemuan tertentu serta membangun forum diskusi online melalui whatsapp. Selain penguatan internal, penguatan SDM yang menangani akuntabilitas juga dilaksanakan setiap tahunnya DINAS PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur dengan Tim SAKIP yang membidangi di UPT PSDAWS melalui forum;
- Dinas PU Sumber Daya Air melalui Tim penyusun akan meningkatkan kualitas dokumen perencanaan Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dengan menyusun indicator sasaran dan indikator program yang memenuhi kriteria SMART serta melakukan penyesuaian dengan dokumen perencanaan lainnya;
- Dinas PU Sumber Daya Air melalui Tim penyusun Laporan Kinerja akan meningkatkan kualitas Laporan Kinerja yang baik sehingga selaras dengan dokumen perencanaan ;
- Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur beserta pimpinan unit kerja lingkup Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur secara telah berkomitmen untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja organisasi sampai dengan kinerja individu setiap bulan. Setiap jenjang jabatan telah dilakukan pengukuran, monitoring, dan evaluasi kinerja melalui aplikasi SAKIP Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur yang kemudian digunakan sebagai acuan dalam pemberian reward and punishment;

- Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air akan tetap di Evaluasi dan dipertahankan untuk perbaikan kedepannya serta akan selalu mengupdate Aplikasi SAKIP pada Dinas PU Sumber Daya Air;
- Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur berkomitmen untuk memperhatikan dan menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi SAKIP yang telah diberikan;
- Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur akan mempertahankan dan meningkatkan kualitas penerapan akuntabilitas kinerja berkelanjutan di tahun selanjutnya.



BAB IV PENUTUP



APEL SIAGA BANJIR

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 merupakan pertanggungjawaban atas kinerja Dinas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024 yang berisi uraian tentang capaian indikator kinerja kegiatan, program dan sasaran yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur.

Secara umum pencapaian sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2022 adalah sebesar 93,47%. Dalam mendukung pelaksanaan pencapaian sasaran strategis, Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur mendapatkan alokasi dana P-APBD tahun 2022 sebesar sebesar Rp 523.958.566.089,- dan terealisasi sebesar Rp 489.763.160.516,- atau mencapai 93,47%.

Pengukuran Kinerja tahun 2022 dapat diuraikan sebagai berikut :

- Sasaran 1 Meningkatnya ketahanan air sektor ekonomi dan kebencanaan :
Indikator Kinerja Indeks Ketahanan Air mendapatkan nilai capaian sebesar 102,04 %.
- Sasaran 2 Bertambahnya Jumlah Bangunan Utama dan Panjang Saluran Pembawa/Pembuang yang diperbaiki :
Indikator Kinerja Persentase kondisi prasarana irigasi dalam kondisi baik mendapatkan nilai capaian sebesar 100 %.
- Sasaran 3 Meningkatkan Keberlanjutan dan ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat :
Indikator Kinerja Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian pada Sistem Irigasi Kewenangan Provinsi mendapatkan nilai capaian sebesar 103,33 %.

- Sasaran 4 Menurunnya kejadian banjir di sungai-sungai yang rawan setelah pembangunan parapet dan normalisasi :
Indikator Kinerja Persentase penurunan jumlah desa yang terdampak kerugian akibat banjir mendapatkan nilai capaian sebesar 138,84 %.
- Sasaran 5 Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah:
Indikator Kinerja Nilai evaluasi implementasi SAKIP perangkat daerah mendapatkan nilai capaian sebesar 101,03 %.

Dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur pada tahun 2022 masih ditemui sejumlah kendala sebagai berikut :

- Kendala dalam pencapaian Realisasi Kinerja Indeks Ketahanan Air pada tahun 2022 dimana data-data penunjang perhitungan didapat dari beberapa OPD terkait.
- Kendala dalam pencapaian Realisasi Kinerja Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik yaitu Laju kerusakan lebih cepat dibandingkan dengan tingkat perbaikan/pemeliharaan.
- Kendala dalam pencapaian Realisasi Kinerja Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian pada Sistem Irigasi Kewenangan Provinsi yaitu Kurangnya Sumber Daya Manusia (Petugas PPA dan pekarya) karena banyak yang purna tugas dan belum ada pengganti sehingga akibat dari hal ini maka adanya penambahan wilayah kerja untuk PPA dan pekarya, dan Kurangnya komitmen penyedia jasa dalam menyelesaikan pekerjaan.
- Kendala dalam pencapaian Realisasi Kinerja Persentase penurunan jumlah desa yang terdampak kerugian akibat banjir yaitu:
 1. Belum adanya Petugas OP Sungai dalam memonitor sungai;
 2. Dikarenakan wilayah Jawa Timur yang luas adanya keterbatasan dalam memonitoring titik kritis banjir sehingga diperlukan adanya peningkatan pembangunan cctv dan telemetri di seluruh wilayah upt psda ws jawa timur;
 3. Keterbatasan armada, biaya dan personil dalam melaksanakan kegiatan normalisasi ataupun pembersihan sungai;
 4. Perubahan tata guna lahan di hulu-tengah DAS meluas dan tidak terkendali, hal ini mengakibatkan terbatasnya/menyusutnya daerah resapan air (recharge area),

berkurangnya embung/ situ/ tampungan air/ cekungan air sehingga menjadi kendala besar pengendalian banjir di hilir. Perilaku masyarakat kota masih banyak yang tidak ramah lingkungan, utamanya dalam hal sampah, dan pertanian tanpa upaya konservasi tanah dan air di wilayah tengah dan hulu DAS pada lahan pertanian dengan kemiringan besar (meningkatkan erosi-sedimentasi dan tanah longsor);

5. Lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran perlindungan LH, utamanya alih fungsi lahan di wilayah resapan air (tengah dan hulu DAS);
6. Kurangnya sinergitas dalam pemanfaatan dana pelaku usaha/csr untuk pengendalian banjir.

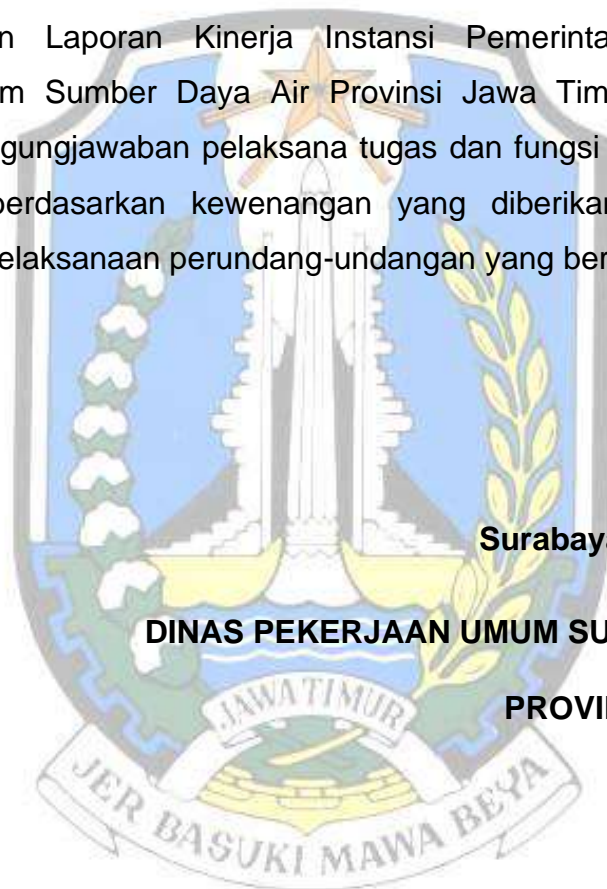
4.2 LANGKAH – LANGKAH DI MASA MENDATANG

Untuk meningkatkan Kinerja di masa mendatang Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Komitmen dari OPD terkait penyampaian data dimaksud. Upaya yang dilakukan dengan rapat koordinasi secara berkala dengan OPD terkait.;
- 2) Dilakukan prioritas terhadap kegiatan fisik (pemeliharaan/rehabilitasi) untuk mengoptimalkan faktor kehilangan air.;
- 3) Pengusulan pengangkatan tenaga PPA dan pekarya, Pelaksanakan kegiatan lelang konstruksi di awal tahun, dan Meningkatkan kualitas kegiatan operasi dan irigasi untuk mempertahankan kinerja jaringan dan layanan air;
- 4) Adanya peningkatan pekerjaan fisik normalisasi dan kegiatan pemeliharaan serta pembangunan fisik di titik kritis banjir di wilayah sungai Provinsi Jawa Timur, Peningkatan monitoring pelaporan banjir secara realtime di Control Room Dinas dengan aplikasi SIBB dan Whatapp grup banjir, Peningkatan monitoring realtime secara visual dengan CCTV di lokasi titik pantau banjir wilayah sungai Provinsi Jawa Timur serta Adanya sistem piket banjir 24 jam terkait pelaporan banjir , koordinasi dan respon dalam menangani banjir bertambahnya titik daerah rawan banjir.

- 5) Adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia maka Dinas PU Sumber Daya Air perlu menambahkan skill / keterampilan dari masing-masing SDM agar lebih berkualitas dengan melalui kegiatan Pembinaan Pegawai.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur yang disajikan sebagai pertanggungjawaban pelaksana tugas dan fungsi serta kinerja yang telah dicapai berdasarkan kewenangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan dan pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku.



Surabaya, Januari 2023

DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR

PROVINSI JAWA TIMUR



LAMPIRAN

FORM PENDANAAN INDIKATIF PADA RENSTRA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Memantapkan kuantitas, kualitas, kontinuitas dan aksesibilitas sumber daya air untuk mendukung sektor-sektor strategis, pencegahan bencana dan peningkatan kesejahteraan rakyat	Menurunkan Dampak atau Kerugian di Daerah Rawan Bencana Banjir		(1.03.02) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	2	988.967.325	2	988.967.325	2	1.250.000.000	2	1.250.000.000	3	1.500.000.000			PSDA	
					Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	8	6.661.000.000	8	6.661.000.000	9	6.750.000.000	9	6.750.000.000	10	7.000.000.000			PSDA	
					Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	5	1.187.607.565	5	1.187.607.565	5	1.310.877.109	5	1.187.607.565	5	2.500.000.000			PSDA	
					Pembangunan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)	6	437.794.223	6	437.794.223	6	437.794.223	6	437.794.223	6	437.794.223			SWP	
					Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	-		-		-		-		-					
						-		-		-		-		-					
						-		-		-		-		-					
						5	42.285.285	5	42.285.285	5	42.285.285	5	42.285.285	5	42.285.285			BONDOWOSO	
						75		75		75		75	1.000.000.000	75				LUMAJANG	
						-		-		-		-		-					
						5		5		5		5	1.000.000.000	5	1.000.000.000			LUMAJANG	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi				
						2020		2021		2022		2023		2024				Kondisi Akhir			
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp		
					Normalisasi/Restorasi/Pemeliharaan Sungai	10	49.105.500	10	49.105.500	10	49.105.900	10	49.105.900	10	49.105.900			LUMAJANG			
						60	1.518.199.945	60	1.518.199.945	60	1.518.199.945	60	1.518.199.945	60	1.518.199.945			PASURUAN			
						2		2		2		2		2							
						2		2		2		2		2							
						5		5		5		5		5							
						-		-		-		-		-							
						1		1		1		1		1	1.000.000.000						
						1	837.805.100	1	837.805.100	1	837.805.100	1	837.805.100	1	837.805.100						
						5		5		5		5		5							
						4	5.711.287.800	4	5.711.287.800	4	8.146.787.800	8	6.321.593.672	10	7.000.000.000			SWP			
						75.000		75.000		75.000		95.000		105.000							
						Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	1	2.917.948.379	1	2.917.948.379	1	2.917.948.379	1	2.917.948.379	1	2.917.948.379			SWP		
							1		1		1		1		1						
						Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	724		724		724		724		724						
							6		6		6		6		6						
							45		45		45		45		45						
							2		2		2		2		2				PSDA		
								576.180.510		576.180.510		576.180.510		576.180.510		576.180.510					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir			
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
						113		113		113		113		113				BONDOWOSO	
							433.382.455		433.382.455		433.382.455		433.382.455		433.382.455				
						-		-		-		-		-					
						10		10		10		10		10					
						145	704.674.100	145	704.674.100	145	704.674.100	145	704.674.100	145	704.674.100				
						2		2		2		2		2					
						19		19		19		19		19					
						94	479.400.000	94	479.400.000	94	479.400.000	94	479.400.000	94	479.400.000				
						1		1		1		1		1					
						10		10		10		10		10					
						68	543.437.954	68	543.437.954	68	543.437.954	68	543.437.954	68	543.437.954				
						3		3		3		3		3					
						6		6		6		6		6					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir			
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
					Operasi dan Pemeliharaan Sungai	1		1		1		1		1					
						2	103.394.340	2	103.394.340	2	103.394.340	2	103.394.340	2	103.394.340			PASURUAN	
						1	61.693.804	1	61.693.804	1	61.693.804	1	61.693.804	1	61.693.804			BONDOWOSO	
						2	92.180.800	2	92.180.800	2	92.180.800	2	92.180.800	2	92.180.800			LUMAJANG	
						1	150.869.376	1	150.869.376	1	150.869.376	1	150.869.376	1	150.869.376			MADURA	
						3	1.715.373.253	3	1.715.373.253	3	1.715.373.253	3	1.715.373.253	3	1.715.373.253			SWP	
						4	1.057.345.620	4	1.057.345.620	4	1.057.345.620	4	1.057.345.620	4	1.057.345.620			BINFAT	
						5	856.418.115	5	856.418.115	5	8.856.418.115	5	8.856.418.115	5	9.856.418.115			BONDOWOSO	
						2	940.361.990	2	940.361.990	2	9.940.361.990	2	9.940.361.990	2	9.940.361.990			LUMAJANG	
						1	810.056.718	1	810.056.718	1	4.026.078.018	1	5.026.078.018	1	7.026.078.018			PASURUAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi		
						2020		2021		2022		2023		2024				Kondisi Akhir	
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
					Operasi dan Pemeliharaan untuk melindungi infrastruktur mata air	1	3.573.694.692	1	3.573.694.692	1	7.573.694.692	1	7.573.694.692	1	8.573.694.692			MADURA	
						1		1		1		1		1					
						1	37.530.000	1	37.530.000	1	37.530.000	1	37.530.000	1	37.530.000			BONDOWOSO	
						1	54.895.600	1	54.895.600	1	4.895.600	1	4.895.600	1	4.895.600			LUMAJANG	
						1	63.990.800	1	63.990.800	1	63.990.800	1	63.990.800	1	63.990.800			LUMAJANG	
						1	67.174.685	1	67.174.685	1	67.174.685	1	67.174.685	1	67.174.685			PASURUAN	
						1	65.053.000	1	65.053.000	1	65.053.000	1	65.053.000	1	65.053.000			PASURUAN	
						1	65.612.500	1	65.612.500	1	65.612.500	1	65.612.500	1	65.612.500			MADURA	
						1		1		1		1		1				MADURA	
					Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing														
																		38.966.230.690	
					Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	-	-	-	-	-	-	1	5.000.000.000	1	5.000.000.000			PASURUAN	
					Peningkatan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)	-	-	-	-	-	-	1	4.000.000.000	1	4.000.000.000			PASURUAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi		
						2020		2021		2022		2023		2024				Kondisi Akhir	
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
						1.000		1.000		1.000		1.000		1.000					
						10		10		10		10		10					
						728		728		728		728		728					
						3		3		3		3		3					
						2.000		2.000		2.000		2.000		2.000					
						6		6		6		6		6					
						770		770		770		770		770					
						4		4		4		4		4					
						3.830		3.830		3.830		3.830		3.830					
						1		1		1		1		1					
						23	730.639.450	23	730.639.450	23	730.639.450	23	730.639.450	23	730.639.450			IRIGASI	
						3	741.496.000	3	741.496.000	3	741.496.000	3	741.496.000	3	741.496.000			IRIGASI	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi		
						2020		2021		2022		2023		2024				Kondisi Akhir	
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
						3		3		3		3		3					
						55	4.949.150.550	55	4.949.150.550	55	7.949.150.550	55	8.949.150.550	55	4.949.150.550				
							6.029.652.800		6.029.652.800		9.029.653.000		9.029.653.000		9.481.255.585				
						13	2.763.493.644	13	2.763.493.644	13	3.763.493.644	13	3.763.493.644	13	4.763.493.644				
						8	1.763.230.800	8	1.763.230.800	8	2.263.231.000	8	2.263.231.000	8	3.263.231.000				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi	
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir				
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
					Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi															
						1	2.415.260.000	1	2.415.260.000	1	3.415.260.000	1	3.415.260.000	1	4.415.260.000					
						4		4		4		4		4						
						5	1.740.583.470	5	1.740.583.470	5	1.240.583.470	5	1.240.583.470	5	3.240.583.470					
																			IRIGASI	
							1.491.038.200		1.491.038.200		1.491.038.200		1.491.038.200		1.491.038.200				IRIGASI	
						55	1.076.340.300	55	1.076.340.300	55	1.076.340.300	55	1.076.340.300	55	1.076.340.300					
						58	848.361.700	58	848.361.700	58	848.361.700	58	848.361.700	58	848.361.700					
						13	63.406.204	13	63.406.204	13	63.406.204	13	63.406.204	13	63.406.204					
						13	1.049.857.300	13	1.049.857.300	13	1.049.857.300	13	1.049.857.300	13	1.049.857.300					
						25	255.400.639	25	255.400.639	25	255.400.639	25	255.400.639	25	255.400.639					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi		
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir					
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
						5	1.461.216.648	5	1.461.216.648	5	1.461.216.648	5	1.461.216.648	5	1.461.216.648						
Meningkatnya Kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah		(X.XX.01) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	20.032.700	6	20.032.700	6	20.032.700	6	20.032.700	6	20.032.700						
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	22.032.700	1	22.032.700	1	22.032.700	1	22.032.700	1	22.032.700						
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	22.032.700	1	22.032.700	1	22.032.700	1	22.032.700	1	22.032.700						
					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1	22.032.700	1	22.032.700	1	22.032.700	1	22.032.700	1	22.032.700						
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1	22.032.700	1	22.032.700	1	22.032.700	1	22.032.700	1	22.032.700						
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	69.248.700	4	69.248.700	4	69.248.700	4	69.248.700	4	69.248.700						
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	88.992.700	1	88.992.700	1	88.992.700	1	88.992.700	1	88.992.700						
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100	112.074.093.000	100	112.074.093.000	100	118.608.298.840	100	121.107.893.532	100	129.090.400.205						
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100	1.724.034.100	100	1.724.034.100	100	1.724.034.100	100	1.724.034.100	100	1.724.034.100						
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100	29.362.700	100	29.362.700	100	29.362.700	100	29.362.700	100	29.362.700						
					Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	23.782.700	12	23.782.700	12	23.782.700	12	23.782.700	12	23.782.700						
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	23.032.700	2	23.032.700	2	23.032.700	2	23.032.700	2	23.032.700						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir			
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1	18.340.100	1	18.340.100	1	18.340.100	1	18.340.100	1	18.340.100				
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	57.532.100	18	57.532.100	18	57.532.100	18	57.532.100	18	57.532.100				
					Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	29.599.556	1	29.599.556	1	29.599.556	1	29.599.556	1	29.599.556				
					Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	500	3.954.872.620	500	3.954.872.620	500	3.954.872.620	500	3.954.872.620	500	3.954.872.620				
					Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	100	539.666.100	100	539.666.100	100	539.666.100	100	539.666.100	100	539.666.100				
					Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	100	956.779.300	100	956.779.300	100	956.779.300	100	956.779.300	100	956.779.300				
					Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	100	669.239.450	100	669.239.450	100	669.239.450	100	669.239.450	100	669.239.450				
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	405.468.142	12	405.468.142	12	405.468.142	12	405.468.142	12	405.468.142				
					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100	82.538.060	100	82.538.060	100	82.538.060	100	82.538.060	100	82.538.060				
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7	2.163.840	7	2.163.840	7	2.163.840	7	2.163.840	7	2.163.840				
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7	1.797.972.753	7	1.797.972.753	7	1.797.972.753	7	1.797.972.753	7	1.797.972.753				
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7	441.909.247	7	441.909.247	7	441.909.247	7	441.909.247	7	441.909.247				
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7	3.370.272.600	7	3.370.272.600	7	3.370.272.600	7	3.370.272.600	7	3.370.272.600				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi		
						2020		2021		2022		2023		2024				Kondisi Akhir	
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4	33.011.500	4	33.011.500	4	33.011.500	4	33.011.500	4	33.011.500				
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4	1.333.237.410	4	1.333.237.410	4	1.333.237.410	4	1.333.237.410	4	1.333.237.410				
					Pemeliharaan Mebel	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000				
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4	513.654.340	4	513.654.340	4	513.654.340	4	513.654.340	4	513.654.340				
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5	1.724.877.400	5	1.724.877.400	5	1.724.877.400	5	1.724.877.400	5	1.724.877.400				



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PU SUMBER DAYA AIR PROVINSI JAWA TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. MUHAMMAD ISA ANSHORI, ATD., MT

Jabatan : Kepala Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Jabatan : Gubernur Jawa Timur

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surabaya, Januari 2022



Pihak Kedua,
GUBERNUR JAWA TIMUR

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Pihak Pertama,
**KEPALA DINAS PU SUMBER DAYA AIR
PROVINSI JAWA TIMUR**

Dr. MUHAMMAD ISA ANSHORI, ATD., MT

Pembina Tingkat I
NIP. 19700916 199403 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PU SUMBER DAYA AIR PROVINSI JAWA TIMUR

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya ketahanan air sektor ekonomi dan kebencanaan	Indeks Ketahanan Air	2,94 %
2.	Bertambahnya Jumlah Bangunan Utama dan Panjang Saluran Pembawa/Pembuang yang diperbaiki	Persentase kondisi prasarana irigasi dalam kondisi baik	68,90 %
3.	Meningkatkan keberlanjutan dan ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat	Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian pada Sistem Irigasi Kewenangan Provinsi	83,00 %
4.	Menurunnya kejadian banjir di sungai-sungai yang rawan setelah pembangunan parapet dan normalisasi	Persentase penurunan jumlah desa yang terdampak kerugian akibat banjir	5,51 %
5.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai evaluasi implementasi SAKIP perangkat daerah	84,26 %

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 114.855.101.237,00	APBD
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp. 328.752.997.032,00	APBD
Jumlah (APBD)	Rp. 443.608.098.269,00	
1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Rp. 91.452.285.000,00	APBN
Jumlah APBD dan APBN	Rp. 535.060.383.269,00	

Surabaya, Januari 2022

Pihak Kedua
GUBERNUR JAWA TIMUR

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Pihak Pertama
**KEPALA DINAS PU SUMBER DAYA AIR
PROVINSI JAWA TIMUR**

Dr. MUHAMMAD ISA ANSHORI, ATD., MT
Pembina Tingkat I
NIP. 19700916 199403 1 006



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PU SUMBER DAYA AIR PROVINSI JAWA TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. BAJU TRIHAKSORO, M.M

Jabatan : Kepala Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Jabatan : Gubernur Jawa Timur

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surabaya, 1 Desember 2022



Pihak Kedua,
GUBERNUR JAWA TIMUR

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Pihak Pertama,
**KEPALA DINAS PU SUMBER DAYA AIR
PROVINSI JAWA TIMUR**

Ir. BAJU TRIHAKSORO, M.M

Pembina Utama Muda
NIP. 19650823 199403 1 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PU SUMBER DAYA AIR PROVINSI JAWA TIMUR

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PERSPEKTIF
1.	Meningkatnya ketahanan air sektor ekonomi dan kebencanaan	Indeks Ketahanan Air	2,94 %	Proses Bisnis
2.	Bertambahnya Jumlah Bangunan Utama dan Panjang Saluran Pembawa/Pembuang yang diperbaiki	Persentase kondisi prasarana irigasi dalam kondisi baik	68,90 %	Penerima Layanan
3.	Meningkatkan keberlanjutan dan ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat	Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian pada Sistem Irigasi Kewenangan Provinsi	83,00 %	Penerima Layanan
4.	Menurunnya kejadian banjir di sungai-sungai yang rawan setelah pembangunan parapet dan normalisasi	Persentase penurunan jumlah desa yang terdampak kerugian akibat banjir	5,51 %	Penerima Layanan
5.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai evaluasi implementasi SAKIP perangkat daerah	84,26 %	Penguatan Internal dan Anggaran

Program		Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 139.295.651.586	P-APBD
2.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp. 384.662.914.503	P-APBD
Jumlah (APBD)		Rp. 523.958.566.089	
1.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Rp. 91.452.285.000	APBN
Jumlah APBD dan APBN		Rp. 615.410.851.089	

Surabaya, 1 Desember 2022



Pihak Kedua
GUBERNUR JAWA TIMUR

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Pihak Pertama
KEPALA DINAS PU SUMBER DAYA AIR
PROVINSI JAWA TIMUR

Ir. BAJU TRIHAKSORO, M.M

Pembina Utama Muda
NIP. 19650823 199403 1 008



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PU SUMBER DAYA AIR PROVINSI JAWA TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. MUHAMMAD ISA ANSHORI, ATD., MT.

Jabatan : Kepala Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Jabatan : Gubernur Jawa Timur

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surabaya, 31 Oktober 2022



Pihak Kedua,
GUBERNUR JAWA TIMUR

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Pihak Pertama,
**KEPALA DINAS PU SUMBER DAYA AIR
PROVINSI JAWA TIMUR**

Dr. MUHAMMAD ISA ANSHORI, ATD., MT.

Pembina Utama Muda
NIP. 19700916 199403 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PU SUMBER DAYA AIR PROVINSI JAWA TIMUR

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PERSPEKTIF
1.	Meningkatnya ketahanan air sektor ekonomi dan kebencanaan	Indeks Ketahanan Air	2,94 %	Proses Bisnis
2.	Bertambahnya Jumlah Bangunan Utama dan Panjang Saluran Pembawa/Pembuang yang diperbaiki	Persentase kondisi prasarana irigasi dalam kondisi baik	68,90 %	Penerima Layanan
3.	Meningkatkan keberlanjutan dan ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat	Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian pada Sistem Irigasi Kewenangan Provinsi	83,00 %	Penerima Layanan
4.	Menurunnya kejadian banjir di sungai-sungai yang rawan setelah pembangunan parapet dan normalisasi	Persentase penurunan jumlah desa yang terdampak kerugian akibat banjir	5,51 %	Penerima Layanan
5.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai evaluasi implementasi SAKIP perangkat daerah	84,26 %	Penguatan Internal dan Anggaran

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 139.295.651.586	P-APBD
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp. 384.662.914.503	P-APBD
Jumlah (APBD)	Rp. 523.958.566.089	
1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Rp. 91.452.285.000	APBN
Jumlah APBD dan APBN	Rp. 615.410.851.089	

Surabaya, 31 Oktober 2022

Pihak Kedua
GUBERNUR JAWA TIMUR



KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Pihak Pertama
**KEPALA DINAS PU SUMBER DAYA AIR
PROVINSI JAWA TIMUR**


Dr. MUHAMMAD ISA ANSHORI, ATD., MT.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700916 199403 1 006

PENGUKURAN KINERJA
DINAS PU SUMBER DAYA AIR PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2022

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI		CAPAIAN
				Th. 2021 (n-1)	Th. 2022 (n)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya ketahanan air sektor ekonomi dan kebencanaan	Meningkatnya ketahanan air sektor ekonomi dan kebencanaan	Indeks Ketahanan Air	2,94	2,95	3,00	102,04
Bertambahnya Jumlah Bangunan Utama dan Panjang Saluran Pembawa/Pembuang yang diperbaiki	Bertambahnya Jumlah Bangunan Utama dan Panjang Saluran Pembawa/Pembuang yang diperbaiki	Persentase kondisi prasarana irigasi dalam kondisi baik	68,90 %	68,86 %	68,90 %	100,00
Meningkatkan keberlanjutan dan ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat	Meningkatkan keberlanjutan dan ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat	Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian pada Sistem Irigasi Kewenangan Provinsi	83,00 %	85,19 %	85,76 %	103,33
Menurunnya kejadian banjir di sungai-sungai yang rawan setelah pembangunan parapet dan normalisasi	Menurunnya kejadian banjir di sungai-sungai yang rawan setelah pembangunan parapet dan normalisasi	Persentase penurunan jumlah desa yang terdampak kerugian akibat banjir	5,51 %	5,70 %	7,65 %	138,84
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai evaluasi implementasi SAKIP perangkat daerah	84,26	84,47	85,13	101,03

KETERKAITAN RPJMD PROVINSI JAWA TIMUR DENGAN RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR TAHUN 2019 - 2024

RPJMD TAHUN 2019 - 2024

VISI :

Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong.

MISI 1 :

Mewujudkan keseimbangan Pembangunan Ekonomi, baik antar kelompok, antar sektor dan keterhubungan wilayah

TUJUAN 1 :

Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi yang didukung Konektivitas Antar Wilayah

SASARAN 9 :

Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar dan Sumber Daya Air

RENSTRA TAHUN 2019 - 2024

TUJUAN :

Memantapkan kuantitas, kualitas, kontinuitas dan aksesibilitas sumber daya air untuk mendukung sektor-sektor strategis, pencegahan bencana dan peningkatan kesejahteraan rakyat

Meningkatkan optimalisasi pengelolaan irigasi

Penyediaan air baku untuk kebutuhan Masyarakat

Menurunkan Dampak atau Kerugian di Daerah Rawan Bencana Banjir

Meningkatnya Kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah

SASARAN :

Meningkatnya ketahanan air sektor ekonomi dan kebencanaan

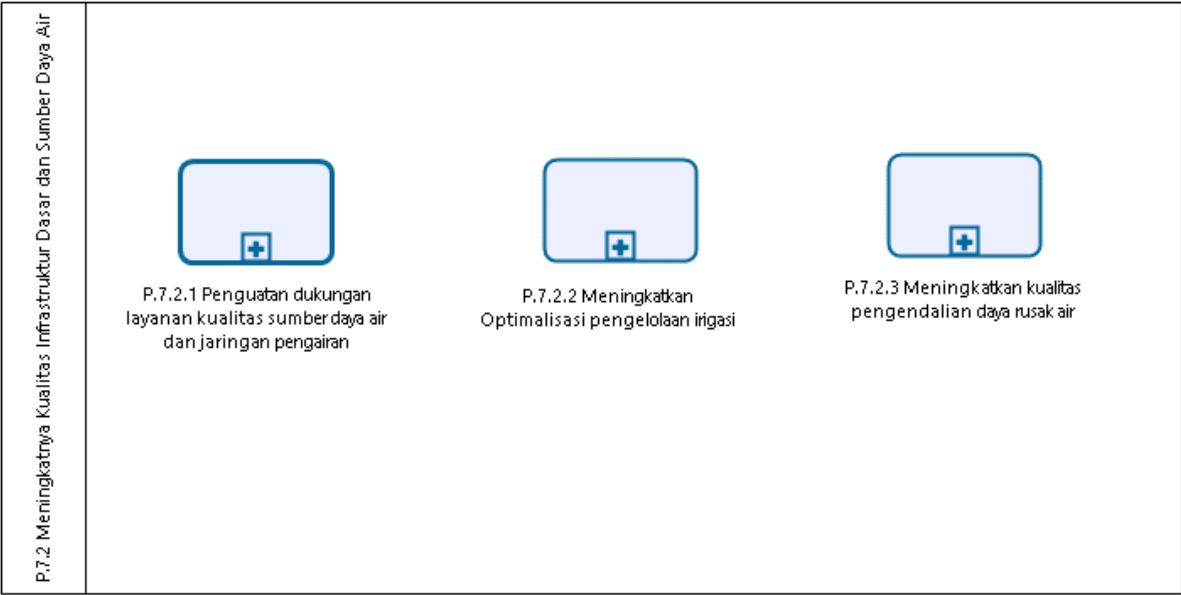
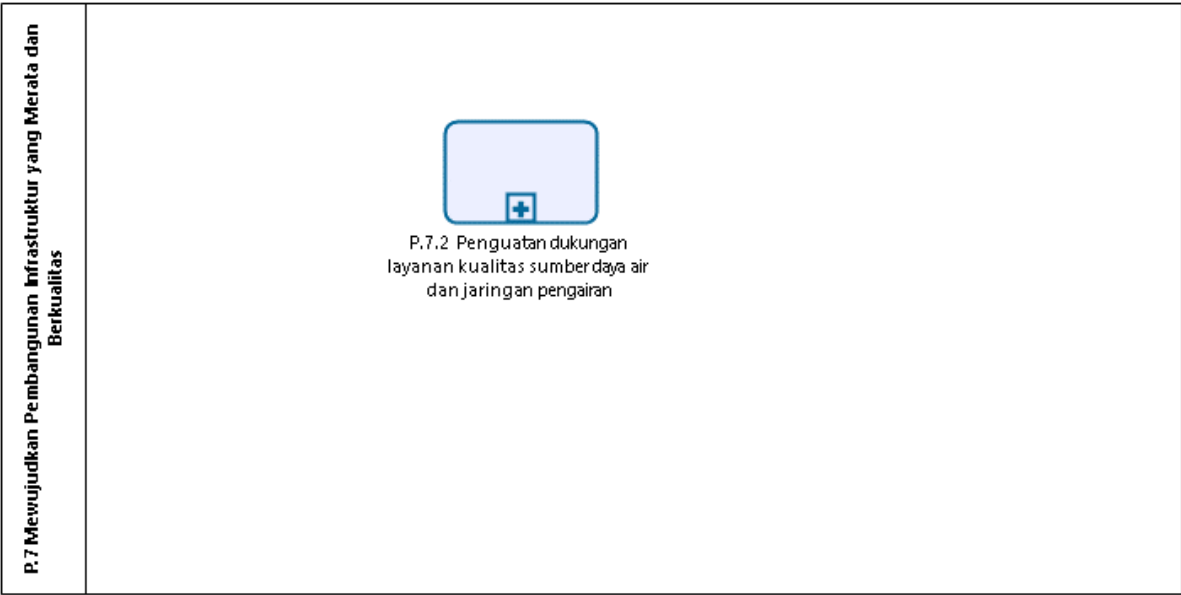
Bertambahnya Jumlah Bangunan Utama dan Panjang Saluran Pembawa / Pembuang yang diperbaiki





Meningkatkan keberlanjutan dan ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat





Menurunnya kejadian banjir di sungai-sungai yang rawan setelah pembangunan parapet dan normalisasi



Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

PROSES BISNIS DINAS PU SUMBER DAYA AIR TAHUN 2022



P.7.2.1 Penguatan dukungan layanan kualitas sumber daya air dan jaringan pengairan	 <p>P.7.2.1.1 Meningkatkan kualitas Perencanaan infrastruktur sumber daya air</p>	 <p>P.7.2.1.2 Mengelola data hidrologi, sistem informasi dan kualitas air</p>
	 <p>P.7.2.1.3 Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya air</p>	 <p>P.7.2.1.4 Meningkatkan kualitas pengendalian lahan dan aset sumber daya air</p>



P.7.2.1.1 Meningkatkan kualitas Perencanaan infrastruktur sumber daya air	 <p>P.7.2.1.1.1 Merencanakan konstruksi Bendungan, embung dan bangunan penampung air lainnya</p>	 <p>P.7.2.1.1.2 Merencanakan konstruksi pengendali banjir, lahar, drainase utama perkotaan dan pengaman pantai</p>
	 <p>P.7.2.1.1.3 Mengevaluasi dan memberikan rekomendasi teknis pemanfaatan SDA WS kewenangan provinsi</p>	 <p>P.7.2.1.1.4 Menyusun pola dan rencana pengelolaan SDA WS kew. Prov</p>

P.7.2.1.2 Mengelola data hidrologi, sistem informasi dan kualitas air		
	P.7.2.1.2.1 Mengelola Sistem informasi hidrologi hidrometeorologi dan hidrogeologi (SIH3)	
		

P.7.2.1.2.1 Mengelola Sistem informasi hidrologi hidrometeorologi dan hidrogeologi (SIH3)

P.7.2.1.2.2 Mengelola data kualitas air WS kewenangan Provinsi

P.7.2.1.2.3 Mengelola data Hidrologi


P.7.2.1.3 Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya air		
	P.7.2.1.3.1 Melaksanakan MOU terkait Irigasi dan Sungai	
		
	P.7.2.1.3.3 Mengadakan sosialisasi dan pembinaan KMPS	



P.7.2.1.3.1 Melaksanakan MOU terkait Irigasi dan Sungai



P.7.2.1.3.2 Mengadakan rapat TKPSDA pada WWS di Jawa Timur



P.7.2.1.3.3 Mengadakan sosialisasi dan pembinaan KMPS





P.7.2.1.3.4 Membentuk dan melaksanakan rapat koordinasi Dewan SDA Provinsi Jawa Timur

P.7.2.1.4 Meningkatkan kualitas pengendalian lahan dan aset sumber daya air	<div><p>P.7.2.1.4.1 Melakukan koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan aset dan lahan sumberdaya air</p></div>
--	--


P.7.2.2 Meningkatkan Optimalisasi pengelolaan irigasi	<div><div><p>P.7.2.2.1 Mengoptimalkan Fungsi Sistem Jaringan Irigasi</p></div><div><p>P.7.2.2.2 Meningkatkan kualitas operasional jaringan sumber daya air</p></div></div>
--	---

P.7.2.2.1 Mengoptimalkan Fungsi Sistem Jaringan Irigasi	<div><div></div><div>P.7.2.2.1.1 Menyusun rencana teknis untuk konstruksi Jaringan Irigasi</div></div> <div><div></div><div>P.7.2.2.1.2 Pemeliharaan jaringan irigasi permukaan dan Bangunan Utama</div></div>
--	---

P.7.2.2.2 Meningkatkan kualitas operasional jaringan sumber daya air	<div><div></div><div>P.7.2.2.2.1 Mengadakan pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan pengelolaan SDA kewenangan provinsi</div></div> <div><div></div><div>P.7.2.2.2.2 Mengoperasikan jaringan irigasi permukaan</div></div>
---	--

P.7.2.3 Meningkatkan kualitas pengendalian daya rusak air		
	P.7.2.3.1 Meningkatkan kualitas pencegahan daya rusak air	P.7.2.3.2 Meningkatkan kualitas penanggulangan daya rusak air
		
	P.7.2.3.3 Meningkatkan kualitas pemulihan prasarana akibat daya rusak air	P.7.2.3.4 Meningkatkan kualitas perlindungan dan pengamanan pantai

P.7.2.3.1 Meningkatkan kualitas pencegahan daya rusak air		
	P.7.2.3.1.1 Membangun Flood Forecasting and warning system (FFWS)	P.7.2.3.1.2 Melakukan normalisasi/restorasi sungai
		
	P.7.2.3.1.3 Pemeliharaan sungai	P.7.2.3.1.4 Membersihkan sampah pada badan sungai

P.7.2.3.2 Meningkatkan kualitas penanggulangan daya rusak air	<div><p>P.7.2.3.2.1 Optimalisasi penanganan darurat sementara untuk kejadian banjir</p></div>
---	--

P.7.2.3.3 Meningkatkan kualitas pemulihan prasarana akibat daya rusak air	<div><p>P.7.2.3.3.1 Meningkatkan kualitas bangunan sungai</p></div>
---	--

P.7.2.3.4 Meningkatkan kualitas perlindungan dan pengamanan pantai	<div data-bbox="719 411 873 518"></div> <div data-bbox="662 533 930 585"><p>P.7.2.3.4.1 Melindungi dan mengamankan bangunan pantai</p></div>
---	---